

**IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PROGRAM SEPULUH RIBU
WIRUSAHA BARU DI KABUPATEN PAMEKASAN**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Ekonomi Syariah



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:
Lian Fawahan
NIM. 02040320025

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Lian Fawahan

NIM : 02040320025

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Agustus 2022

Saya menyatakan,



Lian Fawahan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Implementasi dan Implikasi Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru di Kabupaten Pamekasan” yang ditulis oleh Lian Fawahan NIM 02040320025 ini telah disetujui pada tanggal 10 Agustus 2022.

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Ir. Muhamad Ahsan, MM

NIP. 196806212007011030

PEMBIMBING II



Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag

NIP. 196806271992032001

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Implementasi dan Implikasi Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru di Kabupaten Pamekasan” yang ditulis oleh Lian Fawahan telah diuji dalam
Ujian Tesis

Pada tanggal 11 Agustus 2022

Tim Penguji:

- | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|
| 1. Dr. Ir. Muhamad Ahsan, MM. | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag. | (Sekertaris) |  |
| 3. Dr. Mugiyati, M.E.I. | (Penguji I) |  |
| 4. Dr. Andriani Samsuri, S. Sos, MM. | (Penguji II) |  |

Surabaya, 16 Agustus 2022

Direktur,


Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., M.A., Ph.D.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lian Fawahan
NIM : 02040320025
Fakultas/Jurusan : Magister Ekonomi Syariah
E-mail/address : lianfawahan9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul : IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PROGRAM SEPULUH RIBU WIRUSAHA BARU DI KABUPATEN PAMEKASAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 November 2022

Penulis

(Lian Fawahan)

ABSTRAK

Implementasi dan Implikasi Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru di Kabupaten Pamekasan.

Lahirnya program sepuluh ribu wirausaha baru merupakan langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Pamekasan. Program sepuluh ribu wirausaha baru diharapkan mendorong ekonomi masyarakat Pamekasan yang ditopang dan bertumpu pada UMKM. Melalui program sepuluh ribu wirausaha baru diharapkan lahir wirausaha-wirausaha baru sehingga bisa memiliki efek domino pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menyajikan implementasi dan implikasi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan penelitian kebijakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan merupakan program prioritas Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Implementator dari program sepuluh ribu wirausaha baru diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan pelatihan, untuk bantuan alat produksi bersumber dari forum *corporate social responsibility* (CSR) yang diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyediaan fasilitas pemasaran dan modal diampu oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2020-2021 relisasi program wirausaha baru sudah 3.157 penerima manfaat. Pada tahun 2020 peserta pelatihan atau penerima manfaat program sepuluh ribu wirausaha baru mencapai 84% yang sudah memulai usaha sedangkan 16% tidak menjalankan usaha. Sedangkan peserta pelatihan yang sudah bisa berwirausaha dan menyerap tenaga kerja masih 7%. Implikasi program sepuluh ribu wirausaha baru bagi penerima manfaat yang didapat adalah ilmu dan keterampilan usaha, mental wirausaha, pendapatan bagi penerima manfaat yang berhasil menjalankan usaha, fasilitas pemasaran, modal, dan izin usaha.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Wirausaha Baru

ABSTRACT

Implementation and Implications of the Ten Thousand New Entrepreneurs Program in Pamekasan Regency.

The inception of new entrepreneurship program is a move by the Indonesian government in an effort to alleviate poverty and unemployment in the Pamekasan Regency. The program of ten thousand new entrepreneurs is expected to encourage the Pamekasan community's economy which is supported and relies on micro small and medium enterprises (MSME). Through the program of ten thousand new entrepreneurs, it is hoped that new entrepreneurs will be born so that they can have a domino effect on economic growth and people's income in Pamekasan Regency.

This study presents the implementation and implications of the ten thousand new entrepreneurs program in Pamekasan Regency using a qualitative approach to policy research. The results of the study show that the program of ten thousand new entrepreneurs in Pamekasan Regency is a priority program of the Pamekasan Regency Government as stated in the Regional Medium-Term Development Plan (RMTDP) for 2018-2023. The implementers of the ten thousand new entrepreneurs program are assisted by the Office of Investment and One Stop Integrated Services (DPMPTSP) and Manpower of Pamekasan Regency in carrying out training, for production equipment assistance sourced from the corporate social responsibility (CSR) forum which is supervised by the Regional Development Planning Agency, while the provision of marketing and capital facilities is handled by the Pamekasan Regency Cooperatives and SMEs Service. In 2020-2021 the realization of the new entrepreneurship program has reached 3.157 beneficiaries. In 2020, training participants or beneficiaries of the ten thousand entrepreneur program only reached 84% who had started a business while 16% did not run a business. Meanwhile, 7% of the training participants who are already able to become entrepreneurs and absorb the workforce are still 7%. The implications of the ten thousand new entrepreneurs program for the beneficiaries are business knowledge and skills, entrepreneurial mentality, income for beneficiaries who successfully run a business, marketing facilities, capital, and business licenses.

Keywords: Public Policy, New Entrepreneur

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI UIAN TESIS	v
PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
TRASLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Kegunaan Penelitian	14
F. Penelitian Terdahulu.....	15
G. Metode Penelitian	22
 BAB II LANDASAN TEORI	 30
A. Kebijakan Publik	30
1. Pengertian	30
2. Jenis-Jenis Kebijakan Publik.....	36
B. Implementasi Kebijakan Publik.....	44
1. Implementasi Kebijakan.....	44
2. Model Implementasi Kebijakan Publik	51
C. Kewirausahaan.....	60
1. Pengertian.....	60
2. Karakteristik Wirausaha	64
3. Tipe Wirausaha.....	65

BAB III HASIL PENELITIAN	75
A. Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan	75
1. Gambaran Geografi	75
2. Gambaran Demografi	77
3. Gambaran Pemerintahan	78
B. Deskripsi Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru di Kabupaten Pamekasan	79
1. Latar Belakang dan Tujuan Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru	86
2. Landasan Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru	89
C. Implementasi Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru di Kabupaten Pamekasan.....	91
1. Skema dan Realisasi Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru di Kabupaten Pamekasan.....	91
2. Kebijakan Penunjang.....	93
3. Kendala Implementasi dan Realisasi Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru di Kabupaten Pamekasan.....	95
D. Implikasi Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru Bagi Penerima Manfaat di Kabupaten Pamekasan	97
1. Ilmu dan Keterampilan	97
2. Keinginan Berwirausaha	98
3. Fasilitas	98
4. Pendapatan Penerima Manfaat	99
BAB IV ANALISIS DATA	108
A. Kebijakan Sepuluh Ribu Wirausaha Baru di Kabupaten Pamekasan..	108
B. Implementasi Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru Bagi Penerima Manfaat di Kabupaten Pamekasan.....	114
C. Implikasi Pogram Sepuluh Ribu Wirausaha Baru di Kabupaten Pamekasan.....	125
BAB V PENUTUP	130
A. KESIMPULAN	130
B. SARAN	133
DAFTAR PUSTAKA	135
DAFTAR LAMPIRAN	141

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Batas-batas Wilayah Kabupaten Pamekasan	75
Tabel 3.2	: Rincian Wilayah Kabupaten Pamekasan	76
Tabel 3.3	: Persentase Penduduk di Kabupaten Paemekasan	78
Tabel 3.4	: Rincian Penerima Manfaat Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru Tahun 2020	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Skema Kebijakan Publik	49
Gambar 3.1	: PDRB Kabupaten Pamekasan	82
Gambar 3.2	: Skema Program	91
Gambar 3.3	: Pelatihan Menjahit	95
Gambar 3.4	: Pelatihan Las	95
Gambar 3.5	: Pelatihan Service Sepeda Motor	95
Gambar 4.1	: Alur Implementasi Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru Sampai Masyarakat	114
Gambar 4.2	: Peningkatan Peserta Manfaat	117

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dan pengangguran adalah fenomena yang selalu menjadi persoalan semua negara di dunia termasuk Indonesia. Hal ini bisa dilihat terutama pada masyarakat kelas bawah yang berekonomi lemah. Di Indonesia pada tahun 2021 persentase penduduk miskin berada di angka 9,71% atau 26,50 juta penduduk.¹ Pemerintah Indonesia punya tanggung jawab dalam mengentaskan kemiskinan salah satunya dengan mendorong pelaku UMKM dan menciptakan wirausaha baru. Berdasarkan Kementerian Perindustrian di tahun 2018, rasio wirausahawan Indonesia di dalam negeri masih sekitar 3,1% dari total populasi penduduk. Rasio ini tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai 5% serta Singapura yang berada pada level 7%.² Sedangkan pada tahun 2020 berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), rasio kewirausahaan Indonesia masih sekitar 3,47%.³ Berdasarkan survei *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM) menyatakan bahwa agar negara bisa maju minimal mempunyai rasio

¹ Profil Kemiskinan di Indonesia September 2021, Badan Pusat Statistik.

² Sahroni, Susanto, Moh. Sutoro, Mukrodi, Muger Apriansyah. "Penumbuhan Wirausaha Baru Pada Majelis Da'wah Al'adni." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 01, No. 02, (Mei, 2020), 156.

³ <https://pip.kemenkeu.go.id/id/data-publikasi/berita-terbaru/123-pip-dukung-penguatan-kontribusi-umkm-terhadap-ekonomi> diakses pada tanggal 18 Juni 2022.

entrepreneur 14% dari jumlah penduduk yang ada.⁴ Artinya negara Indonesia masih harus bekerja keras untuk mendorong terciptanya wirausaha baru.

Pelaku UMKM memiliki peran strategis dan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional serta ikut membantu dalam menyerap tenaga kerja. UMKM juga ikut andil berkontribusi terhadap PDB Nasional. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Maret 2021, UMKM di Indonesia telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07%.⁵ Bahkan bisa menciptakan kesempatan kerja hingga 97%.⁶ Apalagi Indonesia juga pernah memiliki sejarah menghadapi krisis tahun 1997 hingga 1998 dan UMKM merupakan salah satu bagian penyangga perekonomian di Indonesia.⁷

Peran penting para pelaku UMKM dan wirausaha baru terhadap perekonomian Indonesia juga tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan. Permasalahan tersebut seperti ketidaktegasan pemerintah dalam upaya pengembangan ekonomi rakyat. Persoalan seperti permodalan, akses terhadap lembaga keuangan, sumber daya manusia, teknologi, serta pasar yang oligopolis dan akses informasi mewarnai

⁴ Yani Mulyaningsih Darwin. *Pengembangan ekosistem kewirausahaan UMKM di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), 01.

⁵ <https://pip.kemenkeu.go.id/id/data-publikasi/berita-terbaru/123-pip-dukung-penguatan-kontribusi-umkm-terhadap-ekonomi> diakses pada tanggal 18 Juni 2022.

⁶ Yani Mulyaningsih Darwin. *Pengembangan ekosistem kewirausahaan UMKM di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), 01.

⁷ Lian Fawahan & Ita Marianingsih. "Membangun Branding Produk UMKM Melalui Media Sosial Tiktok." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 04, No. 02, (2022), 281.

problematika yang harus dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan wirausaha baru. Rendahnya dalam hal melakukan inovasi juga bagian dari kendala kewirausahaan Indonesia. Selain itu ada perbedaan produktivitas antara usaha besar dengan UMKM pada satu dekade terakhir yang menandakan UMKM masih lemah dalam kapasitas kewirausahaan untuk meningkatkan serta mempertahankan daya saingnya dalam perekonomian. Ditambah pada tahun 2020 pelaku usaha harus menghadapi ujian berat karena pandemi covid-19 yang menimbulkan kontraksi ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia. Pada tahun 2020 kurang lebih 69,02% UMKM mengalami kesulitan dalam hal permodalan dikarenakan pandemi Covid-19.⁸ Di berbagai negara kekacauan pada sisi permintaan dan penawaran telah mendorong ekonomi pada ambang krisis. Di Indonesia sebagian orang banyak kehilangan pekerjaan dan jatuh pada jurang kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat.⁹

Kewirausahaan sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia sebenarnya sudah memiliki landasan hukum, antara lain sebagai berikut: (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2011, (2) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010, (3) Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 1981, (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010. Selain itu, upaya untuk mendorong kewirausahaan UMKM juga menjadi agenda penting Pemerintah Indonesia yang tercantum dalam Rencana Pembangunan

⁸ <https://pip.kemenkeu.go.id/id/data-publikasi/berita-terbaru/123-pip-dukung-penguatan-kontribusi-umkm-terhadap-ekonomi> diakses pada tanggal 18 Juni 2022.

⁹ Lian Fawahan & Ita Marianingsih. "Membangun Branding Produk UMKM Melalui Media Sosial Tiktok." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 04, No. 02, (2022), 281.

Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nas)¹⁰ dan dijelaskan secara eksplisit dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Di dalam RPJMN juga ditargetkan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4% di tahun 2024.¹¹ Undang-undang No. 20 Tahun 2008 terkait Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga memberikan amanat dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah agar pemerintah pusat dan daerah bisa bersinergi dengan dunia usaha dan seluruh masyarakat. Kementerian Koperasi dan UKM juga memiliki program dalam memberdayakan UMKM yang tertuang di dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2015-2019 untuk meningkatkan wirausaha baru dengan menciptakan satu juta wirausaha baru secara nasional.¹² Dari payung hukum di atas jelas bahwa pemerintah daerah memang didorong dan diberikan wewenang untuk berusaha mengentaskan kemiskinan di daerahnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dengan menciptakan wirausaha baru.

Di beberapa negara bekerja sebagai wirausaha sudah menjadi tren dan pilihan pekerjaan. Kewirausahaan merupakan langkah bagus menumbuhkan perekonomian dengan menciptakan pekerjaan melalui kreativitas dan inovasi. Oleh karena itu kebijakan yang berorientasi pada

¹⁰ Fidianing Sopah, Winda Kusumawati dan Calvin Edo Wahyudi. "Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo." *Syntax Idea*, Vol. 02, No.0 6, (Juni, 2020), 30.

¹¹ Yani Mulyaningsih Darwin. *Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan UMKM di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), 55.

¹² Mahendra Purnama Yahya, Bambang Santoso dan Alfi Haris Wanto. "Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula di Kementerian Koperasi Dan UKM (Studi Pada Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Profit*, Vol. 12, No. 02, (2018), 32.

kewirausahaan dengan berfokus pada inovasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan kebijakan yang baik. Kebijakan yang mengembangkan kewirausahaan merupakan elemen penting dalam upaya menggerakkan ekonomi serta sebagai stimulus dalam pertumbuhan ekonomi. Perusahaan baru baik kecil atau pun besar akan menjadi mata rantai dan roda perekonomian serta membuat lapangan kerja.¹³

Program kewirausahaan adalah salah satu gerakan ekonomi yang berpihak serta berbasis masyarakat dan merupakan sebuah investasi dalam pembangunan ekonomi yang menggunakan sumber daya manusia (SDM) sebagai instrumen kuncinya. Mendorong wirausaha sejatinya juga menggerakkan sektor usaha mikro. Pemerintah memiliki tanggung jawab serta kewajiban dalam menciptakan derajat kesejahteraan yang optimal bagi seluruh penduduknya. Dalam perekonomian, agar menciptakan kesejahteraan, maka perlu adanya peran pemerintah yang responsif untuk mengelola serta mampu mengorganisasikan suatu sistem ekonomi. Peran pemerintah dalam bidang ekonomi harus jelas, baik dalam kebijakan publik yang diambil dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah juga dituntut adaptif dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial, persaingan ekonomi, dan fluktuasi ekonomi yang terjadi.¹⁴

¹³ Paiman Eko Prasetyo. "Peran Strategis Kewirausahaan Dalam Mendukung Kebijakan *Four Track Strategy* di Indonesia." *Jurnal Optimum*, Vol. 10, No. 01, (Maret, 2020), 84.

¹⁴ Mohammad Imam Sufiyanto dan Shalehoddin. "Pembinaan dan Pelatihan Dalam Pengembangan Wirausaha Program Kegiatan Wirausaha Muda Sumenep (WMS) Untuk Mengembangkan Kewirausahaan" *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial*, Vol. 01, No. 02, (Februari, 2021), 83- 92.

Pemerintah harus memiliki arah kebijakan yang bisa mengatur kegiatan mikroekonomi dan makroekonomi dengan baik. Mendorong pengembangan kewirausahaan dan UMKM merupakan jalan untuk menumbuhkan ekonomi yang inklusif dan akan memperkuat (*driving force*) basis ekonomi kerakyatan, menciptakan daya saing nasional, serta membantu dalam percepatan pengentasan kemiskinan.¹⁵ Kewirausahaan akan menjadi penggerak inovasi serta pertumbuhan ekonomi nasional dan stimulator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewirausahaan adalah pondasi yang baik dalam pembangunan sektor ekonomi, karena kewirausahaan akan membangun kemandirian masyarakat.¹⁶ Menjadikan kewirausahaan UMKM sebagai pembangunan ekonomi jika dikaitkan pada saat ini sangat kontekstual, mengingat kelas menengah Indonesia secara konsisten mengalami peningkatan. Permintaan kebutuhan barang dan jasa menjadi peluang besar bagi UMKM.¹⁷ Apalagi pada masa pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi covid-19, program kewirausahaan merupakan langkah yang tepat.

Para ekonom politik awal berusaha mengembangkan pedoman-pedoman serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi usaha pemerintah untuk mendorong perniagaan. Pasar masih relatif terbelakang pada waktu

¹⁵ Yani Mulyaningsih Darwin. *Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan UMKM di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), 02.

¹⁶ Mohammad Imam Sufiyanto dan Shalehoddin. "Pembinaan dan Pelatihan Dalam Pengembangan Wirausaha Program Kegiatan Wirausaha Muda Sumenep (WMS) Untuk Mengembangkan Kewirausahaan" *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial*, Vol. 01, No. 02, (Februari, 2021), 83- 92.

¹⁷ Yani Mulyaningsih Darwin. *Pengembangan ekosistem kewirausahaan UMKM di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), 02.

itu, sehingga pemerintah aktif membuka area baru untuk perdagangan, penawaran perlindungan dari persaingan, dan penyediaan kontrol atas kualitas produk. Kemudian istilah “*Political Economy*” diperkenalkan pada 1616 oleh penulis Prancis, yaitu Antyene de Monthretien (1571-1621) dalam bukunya yang berjudul *Treatise on Political economy*. Kemudian dalam Bahasa Inggris pada tahun 1767 dengan diterbitkannya *Inquiry into the Principles of Political Economy* oleh Sir James Steuart (1712-1780).¹⁸ Oleh karena itu kebijakan publik yang memiliki orientasi pengembangan ekonomi sejatinya memang perlu dilakukan. Dalam ketatanegaraan dan pemerintahan, kebijakan publik menurut Nugroho hakikatnya memiliki tiga prinsip: (1) konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik, (2) bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan, dan (3) bagaimana kebijakan publik dievaluasi. Kebijakan publik dibuat agar bisa memecahkan masalah-masalah publik atau masyarakat.¹⁹ Dalam hal ini kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan yang kerap menjadi masalah utama masyarakat.

GEM (*global entrepreneur monitor*) (2018) menjelaskan ada sepuluh faktor yang mempunyai pengaruh terhadap ekosistem kewirausahaan, yakni keuangan, program kewirausahaan, program penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, budaya dan norma sosial, *social entrepreneurship*, infrastruktur fisik, infrastruktur

¹⁸ Khairul Anwar. *Ekonomi-Politik* (Riau: Penerbit Alaf, 2011), 23.

¹⁹ Fidianing Sopah, Winda Kusumawati dan Calvin Edo Wahyudi. “Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo.” *Syntax Idea*, Vol. 02, No.0 6, (Juni, 2020), 30.

profesional dan komersial, pendidikan dan pelatihan, serta kebijakan pemerintah.²⁰ Artinya peran kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam membangun dan mendorong kewirausahaan sehingga muncul wirausaha-wirausaha baru. Mengingat pemerintah memiliki daya yang besar untuk melakukan hal tersebut, seperti menyediakan atau mempermudah akses terhadap modal, melakukan pelatihan, membantu dalam hal pasar dan pemasaran, serta kebijakan-kebijakan lain yang mendukung kewirausahaan. Ini senada dengan indentifikasi yang dilakukan oleh *world economy forum* bahwa pendukung (*supporting system*) ekosistem kewirausahaan di antaranya adalah kebijakan pemerintah, pasar, serta pendanaan dan keuangan.²¹

Di berbagai daerah, khususnya Provinsi Jawa Timur, program kewirausahaan telah dilakukan oleh beberapa pemerintah kota/kabupaten. Seperti di Kabupaten Sumenep memiliki program wirausaha muda yang berisi kegiatan menanamkan kewirausahaan melalui pendidikan baik berupa praktek atau teori pada tiap wirausaha muda di Kabupaten Sumenep.²² Di Kabupaten Sidoarjo dalam upaya pengentasan kemiskinan juga mempunyai program pemberdayaan UMKM 1000 Wirausaha Baru.²³

Sedangkan program kewirausahaan juga dilakukan oleh Pemerintah Kota

²⁰ Yani Mulyaningsih Darwin, *Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan UMKM di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), 28.

²¹ Ibid, 26.

²² Mohammad Imam Sufiyanto dan Shalehoddin. "Pembinaan dan Pelatihan Dalam Pengembangan Wirausaha Program Kegiatan Wirausaha Muda Sumenep (WMS) Untuk Mengembangkan Kewirausahaan" *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial*, Vol. 01, No. 02, (Februari, 2021), 90.

²³ Fidianing Sopah, Winda Kusumawati dan Calvin Edo Wahyudi. "Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo." *Syntax Idea*, Vol. 02, No.0 6, (Juni, 2020), 38.

Surabaya yang bekerjasama dengan KB Kota Surabaya untuk memberdayakan masyarakat eks lokalisasi Dolly.²⁴ Kewirausahaan memiliki peran penting dan pelaku UMKM merupakan salah satu kunci perekonomian. Meletakan kewirausahaan dan UMKM sebagai sektor prioritas dalam proses perencanaan serta dalam menyusun kebijakan merupakan langkah yang tepat. Peran dan intervensi kebijakan pemerintah sangat diperlukan bagi pelaku UMKM untuk mengatasi segala permasalahannya.

Kabupaten Pamekasan yang berada di pulau Madura juga tidak terlepas dari kemiskinan. Peran kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam memajukan masyarakat kelas bawah sangat diperlukan. Berdasarkan Pusat Badan Statistik (BPS) Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pamekasan pada Maret 2020 sebesar 14,60 %, hal ini sebanyak 14,95% penduduk Kabupaten Pamekasan berada di bawah garis kemiskinan.²⁵ Selain itu minimnya tingkat partisipasi angkatan kerja masyarakat masih sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2017 yang mencapai 71,08%. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pamekasan mencapai 3,91% serta masih rendahnya jumlah koperasi aktif dan usaha mikro yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja. Pada

²⁴ Bagas Prasetyo Nugroho, "Pemberdayaan Masyarakat Eks Lokalisasi Dolly Melalui Pengembangan Wirausaha oleh Pemerintah Kota Surabaya", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 5, No 2, (Mei-Agustus 2017), 08.

²⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pamekasan*, 2021, 63.

tahun 2016 masih terdapat usaha mikro aktif sebesar 40,37% dan persentase koperasi aktif sebesar 75%.²⁶

Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam upaya pengentasan kemiskinan serta mendorong kesejahteraan masyarakat memiliki program prioritas di bidang ekonomi yakni pembinaan Sepuluh Ribu Wirausaha Baru dan Calon Wirausaha Baru yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023.²⁷ Wirausaha baru ini diproyeksikan bagi sepuluh ribu pengusaha baru dan diberi nama program Saputangan Biru.²⁸ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Pamekasan merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan H. Baddrut Tamam Bupati Pamekasan yang terpilih pada tahun 2018.

Pemerintah daerah atau Pemerintah Kabupaten Pamekasan memiliki wewenang dalam mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk mempercepat kesejateraan masyarakat. Hal ini sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berasaskan desentralisasi. Dimana Pemerintah memberikan sebagian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

²⁶ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023.

²⁷ Ibid.

²⁸ <http://pamekasankab.go.id/berita/194/program-sepuluh-ribu-wirausaha-baru-saputangan-biru> diakses pada tanggal 10 maret 2022.

sendiri urusan pemerintahan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023 merupakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019.²⁹ Dalam rencana pembangunan daerah ini lah landasan program sepuluh ribu wirausaha baru dijelaskan dan menjadi landasan pelaksanaannya di Kabupaten Pamekasan. Program ini dirancang untuk kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Pamekasan. Dengan harapan kelompok-kelompok masyarakat ini dapat mendorong dan menghasilkan efek domino terhadap transformasi ekonomi sosial bagi Kabupaten Pamekasan.

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mengentaskan kemiskinan serta mendorong kesejahteraan masyarakat melalui program sepuluh ribu wirausaha baru telah berjalan dari tahun 2020. Untuk menjalankan program tersebut kolaborasi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dilakukan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro membantu pengembangan sistem pendukung usaha dan pemasaran bagi wirausaha baru dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan memberikan pengawalan dan pelatihan untuk penerima program

²⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 1 Tahun 2022.

wirausaha baru dalam meningkatkan kemampuan pelaku wirausaha baru agar bisa menjalankan usaha dengan baik serta diharapkan menyerap tenaga kerja. Sampai pada tahun 2022 realisasi program wirausaha baru terus berjalan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah memberikan pelatihan gratis hingga tahun 2021 sebanyak 3000 orang.³⁰

Hadirnya program pembinaan sepuluh ribu wirausaha baru (Saputangan Biru) oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Program melahirkan sepuluh ribu wirausaha baru diharapkan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi pendapatan masyarakat serta bisa menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Pamekasan. Peneliti berharap bisa menganalisis dan mengetahui implementasi program sepuluh ribu wirausaha baru (saputangan biru) serta implikasinya bagi penerima manfaat atau objek kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan memiliki banyak kebijakan dan program, baik di bidang kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi. Kebijakan-kebijakan tersebut baik langsung atau pun tidak langsung bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Pamekasan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Akan tetapi fokus penelitian ini hanya pada Implementasi dan Implikasi Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru Di Kabupaten Pamekasan.

³⁰<https://madura.tribunnews.com/2022/02/07/tahun-2022-pemkab-pamekasan-targetkan-melatih-3-ribu-orang-jadi-pengusaha-baru-ini-sasarannya> diakses 25 Juni 2022.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Ukuran dan tujuan program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan.
2. Implementasi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan belum maksimal.
3. Pemberdayaan wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan belum dilaksanakan dengan optimal.
4. Agen pelaksana program sepuluh ribu wirausaha baru kurang memadai.
5. Implikasi dari program sepuluh ribu wirausaha baru baik modal, informasi, serta pemasaran belum maksimal.

Tentu peneliti memiliki berbagai keterbatasan baik berupa waktu, dana, tenaga, dan kemampuan, oleh karena itu penelitian ini hanya membatasi masalah dan fokus pada Implementasi dan Implikasi Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru di Kabupaten Pamekasan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana implementasi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana implikasi program sepuluh ribu wirausaha baru bagi penerima manfaat di Kabupaten Pamekasan?

D. Tujuan Penelitian

Secara garis besar dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk menganalisis serta bahan evaluasi dalam melakukan implementasi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui dan memahami implikasi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Sebagai sumbangan dan perspektif ilmiah dalam ilmu ekonomi khususnya di Prodi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitian ini juga bisa menambah informasi mengenai kebijakan dan kewirausahaan baik bagi pembaca atau yang sedang ingin meneliti penelitian yang sejenis.

2. Aspek Praktis

Sebagai rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Pamekasan khususnya dan kepada penyelenggara pemerintahan pada umumnya dalam mengembangkan serta membuat kebijakan dan program kewirausahaan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul “**Implementasi dan Implikasi Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru di Kabupaten Pamekasan**” tentunya juga harus diiringi oleh beberapa tinjauan pustaka sebagai bagian langkah penting dalam sebuah penelitian. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang menjadi referensi, pandangan, serta acuan dalam menyusun tesis:

No	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Pembinaan Dan Pelatihan Dalam Pengembangan Wirausaha Program Kegiatan Wirausaha Muda Sumenep (WMS)	Kualitatif deskriptif	Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan bisnis baru, baik dari segi desain produk maupun jenis usahanya. Intinya adalah ada inkubator bisnis untuk bisa mengembangkan dan membongkar jiwa wirausaha baru serta mengurangi kewirausahaan bagi Pengusaha Muda dari Kabupaten Sumenep. ³¹	Persamaan: Penelitian ini sama-sama mengenai program pemerintah dan kewirausahaan. Perbedaan: Penelitian terdahulu fokus pada program yang hanya diperutukkan pada wirausaha muda dan untuk

³¹ Mohammad Imam Sufiyanto, Shaleoddin, “Pembinaan Dan Pelatihan Dalam Pengembangan Wirausaha Program Kegiatan Wirausaha Muda Sumenep (WMS) Untuk Mengembangkan Kewirausahaan”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial*, Vol. 1 No. 2 Februari 2021

				penelitian ini diperuntukkan pada semua kalangan wirausaha.
2	Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo.	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kekurangan dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 14 poin C yaitu kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan UMKM “1000 Pengusaha Baru”, yang tidak berhasil dilaksanakan, hasil ini diukur berdasarkan teori Marily S. Grindle, yaitu isi dan implementasi kebijakan. ³²	Persamaan: sama-sama meneliti kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan salah satunya dengan pemberdayaan UMKM dan Program 1000 Wirausaha Baru yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sidoarjo dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sidoarjo. Perbedaan: Target yang dicapai dan stakeholder yang

³² Fidianing Sopah, Winda Kusumawati, Calvin Edo Wahyudi, “Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo”, *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 2, No. 6, Juni 2020.

				menjalankan program tersebut.
3	Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Tingkat Kewirausahaan di Indonesia (Studi pada Program Kredit Usaha Rakyat Periode Tahun 2008-2014)	Eksplanatori (<i>Explanatory Research</i>) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif	Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah memberikan pengaruh positif dan secara parsial memiliki pengaruh terhadap tingkat kewirausahaan di Indonesia. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi hasil penelitian sebelumnya serta fenomena dan keadaan kewirausahaan di Indonesia. ³³	Persamaan: Sama-sama meneliti kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kewirausahaan. Perbedaan: Penelitian ini hanya fokus pada akses terhadap permodalan bagi pelaku usaha yakni proqram kredit usaha rakyat.
4	Pemberdayaan Masyarakat Eks Lokalisasi Dolly Melalui Pengembangan Wirausaha oleh Pemerintah Kota Surabaya	Kualitatif deskriptif	Berdasarkan hasil kajian kolektif eks lokasi dolly melalui pengembangan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan Bapemas KB Kota Surabaya, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. Hal ini dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan perannya dalam mensukseskan program. Beberapa	Persamaan: Kedua penelitian ini berfokus pada peran pemerintah dalam pengembangan wirausaha Perbedaan: Pada penelitian terdahulu Penerima manfaat pada program tersebut hanya pada kalangan eks lokalisasi Dolly.

³³ Adasiha Afwan, "Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Tingkat Kewirausahaan di Indonesia (Studi pada Program Kredit Usaha Rakyat Periode Tahun 2008-2014)", *Skripsi*, 2014.

			saran seperti workshop, mendorong masyarakat untuk aktif, pemasaran dan tentu saja faktor anggaran. ³⁴	
5	Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula di Kementerian Koperasi Dan UKM (Studi Pada Kabupaten Lombok Tengah)	Kualitatif deskriptif	Pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula di Kementerian Koperasi dan UKM masih perlu ditingkatkan, hal ini didasarkan pada perbedaan ukuran dan tujuan politik, dukungan sumber daya dalam pelaksanaan program pemerintah, karakteristik pelaku, sikap/posisi pelaku, komunikasi antar organisasi dengan pelaku kegiatan, lingkungan kebijakan, terdiri dari sosial ekonomi, opini publik dan dukungan elit politik, memberikan respon positif/mendukung program wirausaha pemula. ³⁵	Persamaan: Penelian ini sama-sama meneliti kebijakan pemerintah dalam hal ini kementerian Kementerian Koperasi Dan UKM dalam membangun wirausaha pemula dan UMKM. Perbedaan: Sisi stakeholders yakni Kementerian Koperasi dan UKM sebagai leading sector, Dinkope UKM Provinsi serta Dinkope UKM Kabupaten/Kota. Serta diuntungkan dengan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Kawasan

³⁴ Bagas Prasetyo Nugroho, "Pemberdayaan Masyarakat Eks Lokalisasi Dolly Melalui Pengembangan Wirausaha oleh Pemerintah Kota Surabaya", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 5, No 2, Mei-Agustus 2017.

³⁵ Mahendra Purnama Yahya, Bambang Santoso, Alfi Haris Wanto, "Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula di Kementerian Koperasi Dan UKM (Studi Pada Kabupaten Lombok Tengah)", *Jurnal Profit*, Vol. 12 No.2 2018.

				Ekonomi Khusus terutama KEK Mandalika, yang semakin membantu dalam pengembangan munculnya wirausaha pemula.
6	Implementasi Program Wirausaha Muda Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep	Kualitatif studi kasus	Program wirasusaha muda belum berjalan secara maksimal dikarenakan ada beberapa kendala yaitu: Karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan. ³⁶	Persamaan: Penelian ini sama-sama meneliti kebijakan pemerintah mengenai wirausaha muda. Perbedaan: Penelitian terdahulu fokus pada program wirausaha muda, yang hanya diperuntukan pada dinas koperasi dan usaha mikro dan untuk penelitian ini diperuntukkan pada semua kalangan wirausaha.
7	Peran Pemerintah Terhadap Peningkatan Produktivitas Masyarakat	Kualitatif deskriptif	Peran pemerintah provinsi Jawa Barat untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui program percetakan	Persamaan: Kedua subjek peneitian ini sama yaitu membahas tentang peran

³⁶ Mohammad Hamzah K, Enza Resdiana, Ach. Andriyanto, "Implementasi Program Wirausaha Muda Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep", *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja*, Vol 15, No 2, Desember 2020.

	Melalui Program Percetakan 100.000 Wirausaha		100.000 wirausaha baru berjalan efektif dan berhasil menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan, dan tujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Jawa Barat dapat tercapai. ³⁷	pemerintah dalam menjalankan program wirausaha baru Perbedaan: Target yang dicapai dan stakeholder yang menjalankan program tersebut.
8	Analisis Strategi Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Komunitas Lokal Generasi Milenial Di Kota Banjarmasin	Kualitatif deskriptif	Peran untuk mendukung wirausahawan baru di Kota Banjarmasin, usaha mikro, tenaga kerja dan 6 SKPD bekerjasama dengan komunitas WUB sebagai perantara untuk menyalurkan bantuan. Strategi pengembangan wirausaha baru ini memberikan kontribusi yang sangat berarti, dan dibutuhkan peran aktif dari dinas koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja serta 6 SKPD Banjarmasin karena wirausahawan muda lebih muda beradaptasi dengan lingkungan. ³⁸	Persamaan: Kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai program wirausaha Perbedaan: Penelitian terdahulu objek penelitiannya yaitu pada pengembangan produk kuliner di Kota Banjarmasin dan subjek penelitiannya yaitu generasi milenial, sedangkan penelitian ini objek penelitian pada segala jenis usaha yang ada pada kabupaten

³⁷ Posmaria Sianturi, "Peran Pemerintah Terhadap Peningkatan Produktivitas Masyarakat Melalui Program Percetakan 100.000 Wirausaha", *Jurnal Inspirasi*, Volume 9 No. 2 Agustus 2018.

³⁸ Irwansayah, Novia Nour Halisa, Symaratul Hidayah, "Analisis Strategi Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Komunitas Lokal Generasi Milenial Di Kota Banjarmasin", *Jurnal Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Masyarakat, Universitas Lampung Mangkurat*, Volume 7 Nomor 2.

				pamekasan dan subjek penelitian pada seluruh wirausahawan di kabupaten pamekasan.
9	Efektivitas Program Wirausaha Pemuda Dalam Penciptaan Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Tegal	Kualitatif deskriptif	Program wirausaha pemuda menjadi salah satu alternatif untuk menciptakan lapangan kerja dan program tersebut dapat menekan angka pengangguran di kabupaten Tegal. Program tersebut terdiri dari proses penumbuhan dan pengembangan wirausaha. Dengan adanya program tersebut pemerintah kabupaten Tegal memberikan peluang pada para pemuda untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah. ³⁹	Persamaan: Kedua penelitian tersebut sama-sama membahas tentang program pemerintah tentang kewirausahaan. Perbedaan: Program wirausaha pada penelitian terdahulu sasarannya pada para wirausahawan muda sedangkan penelitian ini pada semua kalangan wirausahawan.
10	Evaluasi Kebijakan Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Kualitatif Deskriptif	Kebijakan program untuk mengembangkan kewirausahaan ialah dengan pelatihan, magang, pendampingan dan bimbingan. Dan kendala dari program ini ialah kurangnya minat para pemuda untuk mengembangkan skill dalam berwirausaha. ⁴⁰	Persamaan: Kedua penelitian ini berfokus pada peran pemerintah dalam pengembangan wirausaha Perbedaan: Penelitian terdahulu fokus pada program wirausaha muda,

³⁹ Mei Tri Widia, "Efektivitas Program Wirausaha Pemuda Dalam Penciptaan Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Tegal", *Jurnal Performance*, Volume 7 Nomor 2 2021.

⁴⁰ Eti Purnama Sari, Rahmi Hidayati, Dedek Kusnadi, "Evaluasi Kebijakan Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda", *Jurnal Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 5 Nomor 1 2019.

				dan untuk penelitian ini diperuntukkan pada semua kalangan wirausaha.
--	--	--	--	---

Penelitian ini mengangkat tema Implementasi dan Implikasi Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru di Kabupaten Pamekasan. program tersebut merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Pamekasan serta janji politik Bupati Pamekasan yang dijalankan serta disokong oleh beberapa organisasi perangkat daerah. Penelitian terdahulu dalam urainnya dalam mendorong wirausaha hanya dilakukan oleh satu instansi serta terbatas oleh segmentasi seperti wirausaha muda di kabupaten sumenep dan eks dolly di Surabaya. Hal yang manarik dari penelitian program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan yakni target dalam menciptakan wirausaha baru yang tergolong tidak sedikit untuk satu periode pemerintahan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara sistematis untuk mencari dan mengumpulkan data serta mempersentasikannya dengan cara ilmiah. Cara ilmiah merupakan kegiatan penelitian yang didasarkan dengan ciri keilmuan yang rasional, emperis, dan sistematis.⁴¹ Oleh karena itu maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis sebagaimana berikut:

⁴¹ Sugiyono. *Metode penelitian kebijakan* (Bandung: Alfabeta, 2017), 15.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kebijakan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kebijakan berguna dalam proses kebijakan. Penelitian tersebut memiliki peran pada tiap proses kebijakan yang meliputi, penyusunan agenda kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, output dan outcome kebijakan, serta evaluasi kebijakan.⁴² Dalam implementasi kebijakan, penelitian kebijakan memiliki peran dalam memonitor pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu penelitian kebijakan akan digunakan dalam meneliti program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan sehingga penelitian ini bisa menyajikan informasi mengenai sejauh mana program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan dilaksanakan.

Penelitian kebijakan ini memakai pendekatan kualitatif, dikarenakan pendekatan kualitatif sangat cocok dengan objek atau keadaan yang masih proses. Pendekatan kualitatif sering dikenal dengan metode baru yang sering dipasangkan dengan postpositivistik, artistic, dan *interpretive research*. Metode kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme dalam penggunaannya meneliti kondisi obyek alamiah dan peneliti menjadi instrument kunci serta menekankan makna pada hasil penelitiannya.⁴³

⁴² Ibid, 11.

⁴³ Ibid, 204.

Metode kualitatif akan digunakan untuk mendeskripsikan proses program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan. Melalui metode kualitatif peneliti menganalisis implementasi program sepuluh ribu wirausaha baru agar bisa menggalang dan mencari permasalahan, menemukan panduan kebijakan, prosedur program, potensi program, kesiapan sumber daya manusia, serta sumber daya lain dalam pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan menjabarkan tentang implementasi dan implikasi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena Pemerintah Kabupaten Pamekasan memiliki program sepuluh ribu wirausaha baru sebagai salah satu program prioritas di bidang ekonomi.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang memberikan data langsung kepada peneliti.⁴⁴ Oleh karena itu peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dari pemangku kebijakan, pelaksana, serta penerima manfaat dari program sepuluh ribu

⁴⁴ Sugiyono. *Metode penelitian kebijakan* (Bandung: Alfabeta, 2017), 234.

wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan. Berikut daftar narasumber:

1. Bupati Pamekasan.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan.
5. Penerima manfaat program sepuluh ribu wirausaha baru dari tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 dengan teknik *purposive sampling*.
6. Fasilitator program sepuluh ribu wirausaha baru Kabupaten Pamekasan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti.⁴⁵ Sumber sekunder berupa penelusuran dokumen atau informasi seperti media masa (surat kabar, majalah, jurnal, dan internet) serta buku-buku yang membahas masalah terkait. Berikut sumber sekunder dalam penelitian ini:

1. Website Pemerintah Kabupaten Pamekasan

⁴⁵ Sugiyono. *Metode penelitian kebijakan* (Bandung: Alfabeta, 2017), 234.

2. Dokumentasi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan oleh pemerintah, fasilitator, serta penerima program tersebut.
3. Informasi dari surat kabar atau media online mengenai program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan.
4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang akan diteliti.⁴⁶ Melalui observasi peneliti bisa mengamati sendiri serta mencatat perilaku serta kejadian yang terjadi. Dalam penelitian ini pengamatan akan dilakukan dalam pelaksanaan program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan. Baik dalam proses pelatihan dan aktivitas usaha dari penerima manfaat dari program tersebut.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.⁴⁷ Dari wawancara tersebut diharapkan menemukan data realisasi atau implementasi program, deskripsi program, tantangan, harapan,

⁴⁶ Sutrisno Hadi. *Metodelogi Research 2* (Yogyakarta: Andi Publisher, 2000), 136.

⁴⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 207.

implikasi serta makna dari program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan.

c. Dokumentasi

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain.⁴⁸ Data yang akan diambil adalah data yang relevan dengan penelitian ini. Mengumpulkan data dengan menelusuri buku-buku ilmiah, literatur, media cetak, dan semua bahan tertulis lainnya. Data deskriptif dari berbagai sumber akan disusun kembali untuk diintegrasikan dengan penelitian ini. Dengan langkah ini data tersebut bisa berupa dokumen, foto, pamflet, data kelompok, dan organisasi pemerintah pelaksana program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan dan data lain yang mendukung serta menunjang dalam penelitian.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian, dalam penelitian kualitatif, merupakan peneliti itu sendiri sebagai alat penelitian. Peneliti menjadi instrumen (*Human Instrument*) maka perlu validasi terhadap peneliti dalam menjalankan penelitian dan terjun ke lapangan.⁴⁹ Peneliti juga berfungsi menetapkan fokus dan mencari informan sebagai sumber data, menafsirkan, serta menilai kualitas data mengenai program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan.

6. Teknik Analisis Data

⁴⁸ Ibid, 213.

⁴⁹ Sugiyono. *Metode penelitian kebijakan* (Bandung: Alfabeta, 2017), 231.

Langkah selanjutnya merupakan analisis data yang telah dikumpulkan mengenai program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan, walaupun dalam penelitian kualitatif sudah dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data merupakan upaya dan proses memilih mana yang penting dan tidak, menyusun data dengan sistematis baik itu hasil dari wawancara, dokumentasi, pengamatan, catatan lapangan, lalu mengorganisasikan data, menemukan pola, dan memutuskan apa yang bisa dijelaskan kepada orang lain.⁵⁰ Sehingga bisa membuat kesimpulan yang bisa dipahami oleh peneliti dan orang lain.

Analisis data juga berfungsi dalam menyempitkan dan membatasi temuan sampai menjadi suatu data yang teratur, tersusun dan lebih berarti. Setelah data terkumpul selanjutnya diikuti dengan kegiatan pengolahan data (*data processing*) yakni *checking* (pengecekan) dan *organizing* (pengelompokan). Data yang relevan akan digunakan sebagai rujukan dalam pembahasan.

Untuk mempermudah langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Data yang terkumpul dari lapangan tentu akan banyak oleh karena itu dilakukan reduksi data. Proses ini memilih data yang penting

⁵⁰ Lexy J Moeleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 327.

dan relevan, baru, serta mencari polanya membuang data yang tidak perlu supaya maknanya lebih jelas.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah berikutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, Miles and Huberman (1984) berpendapat “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”.⁵¹ Penelitian kualitatif seringkali menggunakan teks yang bersifat narasi untuk menyajikan data.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Selanjutnya merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini tentu sudah hasil analisis melalui teori serta didukung oleh bukti-bukti yang valid serta konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Oleh karena itu kesimpulan yang disampaikan adalah kesimpulan yang kredibel dan terverifikasi serta bisa menjawab rumusan masalah dari penelitian yang dibuat.

Sesudah proses menganalisis data, maka hasil analisis tersebut diinterpretasikan dan disimpulkan agar bisa menjawab keseluruhan masalah seputar program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan dengan kebenaran yang ilmiah.

⁵¹ Sugiyono. *Metode penelitian kebijakan* (Bandung: Alfabeta, 2017), 245.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian

Kebijakan publik adalah istilah yang diambil dari Bahasa Inggris, yakni *public policy*. Istilah *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” walau pun sebagian ada mengartikan menjadi “kebijaksanaan”.⁵² Kendati terjadi perdebatan pada istilah *policy* tersebut, akan tetapi kecenderungan kata itu digunakan untuk kebijakan. Oleh sebab itu *public policy* diartikan sebagai kebijakan publik.

Kebijakan mempunyai beberapa makna, Hogwood dan Gunn menyatakan beberapa istilah kebijakan digunakan sebagai sebuah aktivitas negara yang diharapkan untuk kepentingan umum seperti sebuah program, output, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai hasil (*outcome*), sebagai model atau teori. Kebijakan merujuk Bahasa Inggris merupakan perangkat tindakan atau rencana yang memiliki tujuan politik.⁵³ Kebijakan menyiratkan rangkaian aktivitas yang bertujuan ke masa depan serta melibatkan hubungan organisasi dengan peran agen kebijakan.

Beberapa pendapat mengenai kebijakan seperti James E. Anderson (1970) berpendapat bahwa, “*Public policies are those*

⁵² Sahya Anggara. *Pengantar Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 35.

⁵³ Eko Handoyo. *Kebijakan Publik* (Semarang: Widya Karya, 2012), 04.

policies developed by governmental bodies and officials” (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah). Sedangkan Thomas R. Dye (1992) menyatakan, “*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu).⁵⁴ Artinya bahwa setiap sikap yang dipilih pemerintah harus memiliki tujuan, baik itu dilakukan atau tidak melakukan, karena setiap tindakan pemerintah merupakan kebijakan publik.

Selain itu, Post, et al (1999) mengartikan bahwa kebijakan merupakan kerangka aksi yang akan dikerjakan oleh pejabat pemerintah agar mendapatkan tujuan yang lebih luas serta bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat secara substansial. Sedangkan Friedrich memaknai kebijakan adalah aktivitas yang memiliki tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam kondisi tertentu untuk mengatasi masalah atau hambatan serta juga berupaya mencari solusi dan peluang agar tujuan bisa tercapai.⁵⁵ Dari beberapa pendapat di atas bisa diambil kesamaan konsep kebijakan publik, yakni sama-sama memiliki fokus terhadap tindakan dan keputusan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan atau untuk tujuan tertentu. Tujuan – tujuan tersebut dalam kebijakan publik bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi untuk kepentingan

⁵⁴ Sahya Anggara. *Pengantar Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 35.

⁵⁵ Eko Handoyo. *Kebijakan Publik* (Semarang: Widya Karya, 2012), 05.

masyarakat luas. Oleh karenanya Ranson dan Steward menyatakan peran publik dalam mewarnai kebijakan publik mempunyai peran esensial dalam mencapai tujuan publik, yang juga bagian dari tujuan kelompok atau individu.⁵⁶

Dalam tata kelola negara (*governance*), kebijakan publik merupakan salah satu cara untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan penduduknya. Akan tetapi sejauh mana kebijakan publik tersebut memiliki signifikansi sebagai komponen pemerintahan. Oleh karena itu dijelaskan oleh Nugroho bahwa pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara. Dalam pengelolaan tersebut maka salah satu caranya melalui kebijakan publik. kebijakan publik yang baik tidak hanya untuk mengelola, tetapi juga sebagai kendali negara dan untuk mencapai tujuan negara. Negara adalah pemegang kekuasaan yang sah dan kebijakan publik hakikatnya adalah kebijakan negara, maka bisa diartikan tindakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan harus bisa memastikan tujuan yang sudah dirumuskan dan disepakati oleh publik bisa dicapai. Dengan dasar tersebut maka kebijakan publik berhubungan dengan penggunaan kekuasaan yang berlangsung dalam latar, wilayah, dan konteks.

Kebijakan publik juga bisa dinilai dalam melihat relasi antara rakyat dan pemerintah. Hal ini juga bisa digunakan melihat hubungan

⁵⁶ Ibid, 06.

antara penerima program wirausaha baru dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Penerima program wirausaha baru dalam perspektif kebijakan publik memiliki posisi pihak yang harus mendapatkan perhatian dan pelayanan, sedangkan Pemerintah Kabupaten Pamekasan beserta aparaturnya adalah pihak yang sudah seharusnya memberikan pelayanan melalui kebijakan yang dibuat. Ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh Ndraha bahwa pemerintah memiliki fungsi membuat produk kebijakan yang dibutuhkan dan masyarakat adalah konsumennya.⁵⁷ Kebijakan publik harus bisa menghilangkan, paling tidak, mengurangi permasalahan-permasalahan publik.

Kebijakan publik menurut Bridgeman dan Davis (2004) setidaknya mempunyai tiga dimensi yang saling berhubungan. Tiga dimensi tersebut ialah, (1) sebagai tujuan (*objective*), (2) tindakan yang dipilih sah secara hukum atau legal (*authoritative choice*), dan yang terakhir (3) hipotesis (*hypothesis*).⁵⁸ Kebijakan publik harus memiliki tujuan serta dibuat untuk menghasilkan hasil yang diinginkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Indonesia adalah negara hukum maka kebijakan publik harus kegiatan yang legal dan sah secara hukum. Selanjutnya, kebijakan publik merupakan hipotesis yaitu kebijakan yang dibuat atas dasar teori, model, atau hipotesis mengenai

⁵⁷ Eko Handoyo. *Kebijakan Publik* (Semarang: Widya Karya, 2012), 04.

⁵⁸ Sahya Anggara. *Pengantar Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 42.

sebab dan akibat, karena kebijakan selalu bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku.

Prinsip-prinsip kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan, menurut Nugroho pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip,⁵⁹ yaitu:

- a. cara merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan);
- b. cara kebijakan publik diimplementasikan;
- c. cara kebijakan publik dievaluasi.

Ada beberapa variabel untuk menyusun kebijakan yang pada hakikatnya bisa digolongkan sebagai elemen dasar kebijakan untuk mencerminkan keperluan terhadap adanya suatu pemahaman logis, keterlibatan institusional, serta formalisasi dari proses atau mekanisme dalam membuat kebijakan. Jones (1976) berpendapat bahwa dalam perspektif konseptual beberapa variabel penting yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu kebijakan, yaitu sebagai berikut:⁶⁰

a. Persepsi/Definisi

Kebijakan perlu dan butuh diterangkan dengan jelas baik dari latar belakang, permasalahan, serta hal-hal yang mendukung pentingnya ide kebijakan tersebut. Langkah ini penting dilakukan agar tidak timbul multipersepsi atas substansi kebijakan yang dibuat.

⁵⁹ Sahya Anggara. *Pengantar Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 39.

⁶⁰ Ibid, 50.

b. Agregasi

Dalam kebijakan, identifikasi ruang lingkup serta kuantitas dari beberapa pihak yang menjadi objek kebijakan perlu diperhatikan. Isi kebijakan diharapkan bisa mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak secara adil, proporsional, serta memiliki prioritas.

c. Organisasi/Lembaga

Selanjutnya merupakan memperhatikan rekam jejak para pelaku (*policy maker*) yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Hendaknya kebijakan dilaksanakan oleh instansi/organisasi yang sesuai.

d. Agenda Setting

Merupakan langkah-langkah atau prosedur bagaimana ide kebijakan akan dilaksanakan (gagasan hingga status agenda). Kegiatan ini berupa sosialisasi kepada para *stakeholders* dan berbagai pihak baik sejak proses perumusan, pembahasan, hingga penetapan kebijakan. Agenda ini harus dilakukan untuk meminimalisir pemahaman atau ketidakpuasan yang mungkin akan muncul.

e. Selain di atas, beberapa hal yang tidak boleh luput dari perhatian seperti dasar hukum sebagai pegangan, lembaga yang mengusulkan kebijakan, data atau informasi, ketersediaan anggaran, serta prosedur penetapan kebijakan. Dalam membuat sebuah kebijakan

yang penting dihilangkan adalah kepentingan pribadi serta ego sektoral.

2. Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Dibawah ini jenis-jenis kebijakan publik menurut James E. Anderson (1970), jenis itu dikelompokkan sebagaimana berikut:⁶¹

a. *Substantive and Procedural Policies*

Substantive policy merupakan kebijakan yang dilihat dari masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Contohnya seperti kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan. Sedangkan *Procedural policy* atau kebijakan prosedural adalah kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (*policy stakeholders*). Kebijakan procedural juga bisa dilihat bagaimana kebijakan substantif dijalankan, karena kebijakan tersebut bersifat teknis atau tentang standart dan prosedur (*standart operating procedure*).⁶² Contohnya kriteria penerima bantuan atau instansi-instansi yang terlibat dalam menjalankan kebijakan.

b. *Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies*

Distributive policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu, kelompok, atau perusahaan. Contoh, kebijakan tentang *tax holiday*.

⁶¹ Sahya Anggara. *Pengantar Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 55.

⁶² Ibid, 55.

Redistributive policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak. Contoh, kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

Regulatory policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/tindakan. Contohnya tentang larangan berkumpul saat pandemi Covid-19.

c. *Material Policy*

Material policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Contoh, kebijakan pembuatan rumah sederhana.

d. *Public Goods and Private Goods Policies*

Public goods policy adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Contoh, kebijakan tentang perlindungan keamanan dan, penyediaan jalan umum.

Private goods policy adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu (perseorangan) di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu. Contoh tempat hiburan, hotel, dan lain-lain.

Dilihat dari tingkatannya kebijakan publik berdasarkan Lembaga Administrasi Negara (1997), di kategorikan sebagaimana berikut:⁶³

a. Lingkup nasional

1. Kebijakan nasional

Kebijakan nasional adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional/negara sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945. MPR, Presiden, dan DPR adalah yang berwenang menetapkan kebijakan nasional. Kebijakan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat berbentuk UUD, Ketetapan MPR, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).

2. Kebijakan umum

Kebijakan umum adalah kebijakan Presiden sebagai pelaksanaan UUD, TAP MPR, UU, untuk mencapai tujuan nasional. Presiden berwenang menetapkan kebijakan umum. Kebijakan umum yang tertulis dapat berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden.

3. Kebijakan pelaksanaan

Kebijaksanaan pelaksanaan merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang

⁶³ Sahya Anggara. *Pengantar Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 41.

tertentu. Dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan, yang berwenang adalah menteri/pejabat setingkat menteri dan pimpinan LPND. Kebijakan pelaksanaan yang tertulis dapat berbentuk peraturan, keputusan, atau instruksi pejabat.

b. Lingkup daerah

1. Kebijakan umum

Kebijakan umum di lingkup daerah adalah kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan Rumah Tangga Daerah. Dalam menetapkan kebijakan umum di daerah provinsi, yang berwenang adalah Gubernur dan DPRD Provinsi. Di daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota. Kebijakan umum di tingkat daerah dapat berbentuk Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Kebijakan Pelaksanaan

Kebijakan pelaksanaan di lingkup Wilayah/Daerah ada tiga macam, yaitu: a) kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi merupakan realisasi pelaksanaan Peraturan Daerah; b) kebijakan pelaksanaan dalam rangka dekonsentrasi merupakan pelaksanaan kebijakan nasional di Daerah; c) kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan

(medebewind) merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Berikut ini yang berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan, antara lain: (1) dalam rangka desentralisasi adalah Gubernur/Bupati/Walikota; (2) dalam rangka dekonsentrasi adalah Gubernur/Bupati/Walikota; (3) dalam rangka tugas pembantuan adalah Gubernur/Bupati/ Walikota; (4) dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan berupa Keputusan dan Instruksi Gubernur/Bupati/Walikota; (5) dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi berbentuk Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.⁶⁴

3. Kebijakan Publik dalam Perspektif Islam

Kebijakan dan ekonomi dalam Islam merupakan pilar penyangga keimanan yang juga perlu diperhatikan. Kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW menjadi pedoman bagi para penggantinya dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. Al-Qur'an dan Hadis adalah dasar pijakan teori kebijakan ekonomi oleh para khalifah dan seterusnya dalam menata kehidupan ekonomi negara. Meskipun pada masa awal Islam permasalahan-permasalahan ekonomi belum variatif sehingga teori-teori tentang kebijakan ekonomi juga belum banyak muncul. Hal ini bisa dilihat bahwa fokus ekonomi hanya tertuju pada

⁶⁴ Sahya Anggara. *Pengantar Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 42.

pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan, yang dibawa oleh masa awal Nabi Muhammad.⁶⁵

Setelah wafatnya Nabi Muhammad empat tokoh pemimpin atau di era *Khulafa al-Rasyidin* berbagai kebijakan publik yang dibuat seperti pendirian Baitul Mal, pembagian bantuan sosial, dana pensiun, gaji untuk para tentara, kemudian pembagian zakat serta pemungutan pajak untuk masyarakat Muslim dan NonMuslim. Semua kebijakan tersebut untuk memajukan perekonomian Negara dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Hakikat politik ekonomi Islam adalah kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintahan dalam pembangunan ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.⁶⁶ Politik ekonomi Islam memiliki daya tawar positif bagi percepatan pembangunan ekonomi melalui kemitraan usaha dengan kalangan usaha kecil dan menengah. Ekonomi Islam menawarkan suatu konsep pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan, pemerataan dan keseimbangan ekonomi baik secara mikro maupun makro. Dengan mengutamakan etika bisnis dan moralitas keagamaan, konsep ekonomi Islam dianggap memiliki banyak keunggulan daripada sistem ekonomi yang lain.

Kebijakan publik dalam Islam khususnya dalam ekonomi berpegang pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut;

⁶⁵ Aisya Farina. "Refleksi Sejarah Perkembangan Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Islam Pada Masa Khulafa' al-Rasyidin. *Iltizamat*, Vol 2, No 1, (Juni, 2022), 91.

⁶⁶ Ibid, 101.

- a. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allahlah pemilik yang absolut.
- b. Manusia adalah Pemimpin (kholifah) di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya.
- c. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung.
- d. Menghilangkan jurang perbedaaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan.
- e. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.⁶⁷

Kebijakan publik dalam Islam merupakan salah satu dari berbagai alat yang bekerja untuk mencapai tujuan Syariah. Secara teknis, seperti negara-negara lain, dalam negara Islam juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga hukum, ketertiban, dan menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam Islam, negara harus memiliki peran dalam mengurangi kesenjangan pendapatan kekayaan serta mendorong tatanan ekonomi yang berkeadilan. Dalam negara Islam stabilitas perekonomian dianggap wajib. Salah satu contohnya seperti kasus inflasi yang dapat membahayakan kesejahteraan masyarakat dan

⁶⁷ Amien Wahyudi. "Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam". *Justitia Islamica*, Vol. 10, No. 1, (Juni, 2013), 60.

menghasilkan distribusi pendapatan dan kekayaan yang terpusat di tangan si kaya saja. Conoth kebijakan publik dalam Islam seperti yang di amati oleh Ibn Khaldun adalah kebijakan fiskal. Menurut Ibn Khaldun negara harus memperhatikan arus keuangan publik.⁶⁸ Oleh karena itu kebijakan publik di bidang ekonomi dalam Islam juga sangat diperhatikan dan memaikan perang penting dalam mengntrol serta mendorong masyarakat ekonomi lemah.

Di Indonesia hadirnya peraturan daerah yang bernuansa Syari'at Islam dalam bentuk surat edaran bupati atau parlemen daerah menunjukkan betapa kuat dan tingginya dominasi suatu kelompok dalam proses kebijakan publik. Keinginan kuat untuk menerapkan nilai keislaman muncul dari berbagai kelompok. Dalam perspektif pluralisme politik, hal ini tentu tidak bisa dibenarkan. Ini mengingat kekuasaan harus terdistribusi ke semua kelompok dan tidak boleh dinikmati satu kelompok saja. Selain itu, kebijakan publik juga seharusnya memiliki kewenangan yang mencakup semua masyarakat dan tidak hanya mengatur kelompok tertentu.⁶⁹

Formulasi kebijakan publik atau penerapan Syariat Islam melalui instrumen negara hendaknya melalui dialog dengan mengundang semua kelompok yang difasilitasi pemerintah. Sebagai pemegang otoritas publik pemerintah harus mengkaji resiko dari setiap

⁶⁸ Any Setianingrum. "Desentralisasi Fiskal Kontemporer dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam". *Ekonomika-Bisnis*, Vol. 4 No.1, (Januari, 2013), 07.

⁶⁹ M. Zainal Anwar. "Formalisasi Syari'at Islam Di Indonesia: Pendekatan Pluralisme Politik Dalam Kebijakan Publik". *Millah*, Vol. X, No 2, (Februari, 2011), 210.

kebijakan publik yang dibuat dalam negeri plural seperti Indonesia. Pemerintah tidak bisa hanya menampung aspirasi kelompok tertentu. Kebijakan publik harus menampung aspirasi berbagai kelompok dalam proses pembuatannya. Kebijakan publik merupakan hasil dari persetujuan dan menyerap di atas kepentingan semua kelompok. Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan pihak yang harus bisa mengakomodasi semua kepentingan dan aspirasi setiap kelompok atau masyarakat.⁷⁰ Kebijakan publik dalam ekonomi Islam secara filosofis mencakup atas prinsip ibadah (*al-tauhid*), persamaan (*al-musawat*), kebebasan (*al-hurriyat*), keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*al-ta'awun*) dan toleransi (*al-tasamuh*).⁷¹

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian

Hal yang paling esensial dalam kebijakan negara adalah melaksanakan kebijakan negara. Jika suatu kebijakan tersebut telah diputuskan, maka kebijakan tersebut tidak akan berhasil dan terwujud jika tidak dilaksanakan. Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap

⁷⁰ Ibid, 210.

⁷¹ Aisya Farina. "Refleksi Sejarah Perkembangan Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Islam Pada Masa Khulafa' al-Rasyidin. *Iltizam*, Vol 2, No 1, (Juni, 2022), 93.

sesuatu).⁷² Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia implementasi memiliki arti pelaksanaan atau penerapan.

Beberapa pendapat mengenai kebijakan seperti Van Meter dan Van Horn (1975) memberikan pengertian implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pressman & Wildavsky, mengemukakan implementasi merupakan interaksi antara penyusun tujuan dengan sarana tindakan dalam mewujudkan tujuan tersebut, kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Jones (1991) mengemukakan beberapa dimensi dari pelaksanaan pemerintah terkait program yang telah disahkan, kemudian menentukan implementasinya, selanjutnya membahas *stakeholder* yang terlibat dengan fokus pada birokrasi yang merupakan konsep dinamis yang melibatkan secara terus-menerus upaya menemukan ‘apa’ yang akan dan dapat dilakukan.⁷³

Marilee S. Grindle (1980) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan negara sesungguhnya bukanlah sekedar berangkat dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin untuk saluran birokrasi, namun juga terkait dengan masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh ‘apa’ dari suatu kebijakan. Oleh

⁷² Sahya Anggara. *Pengantar Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 232.

⁷³ Agus Subianto. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi*. (Surabaya: Brilliant, 2020), 19.

karenanya, implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Grindle mengatakan bahwa proses implementasi baru dimulai jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dana telah disiapkan, serta disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut.⁷⁴

Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) sejak kurang lebih tiga dekade terakhir, menjadi fokus perhatian para ilmuwan sosial, khususnya ilmu politik dan administrasi negara, baik di negara maju atau industri maupun di negara berkembang. Masalah implementasi kebijakan (pembangunan) menarik perhatian, karena berdasarkan pengalaman di negara maju maupun negara berkembang menunjukkan, bahwa beragam faktor, baik faktor yang sederhana hingga yang rumit.⁷⁵ Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari hal-hal yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi, dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

⁷⁴ Agus Subianto. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi*. (Surabaya: Brilliant, 2020), 19.

⁷⁵ Agus Subianto. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi*. (Surabaya: Brilliant, 2020), 16.

Dengan kata lain, implementasi merupakan tahap suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan.⁷⁶

Masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan/dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan suatu kebijakan negara, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat.

Implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung-jawab untuk melaksanakan program serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari stakeholder yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover/negative effect*). Pandangan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier, yakni antara apa yang disebut sebagai perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan tidak dianggap sebagai suatu hal yang terpisah, sekalipun mungkin secara analitis bisa dibedakan.⁷⁷

⁷⁶ Sahya Anggara. *Pengantar Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 232.

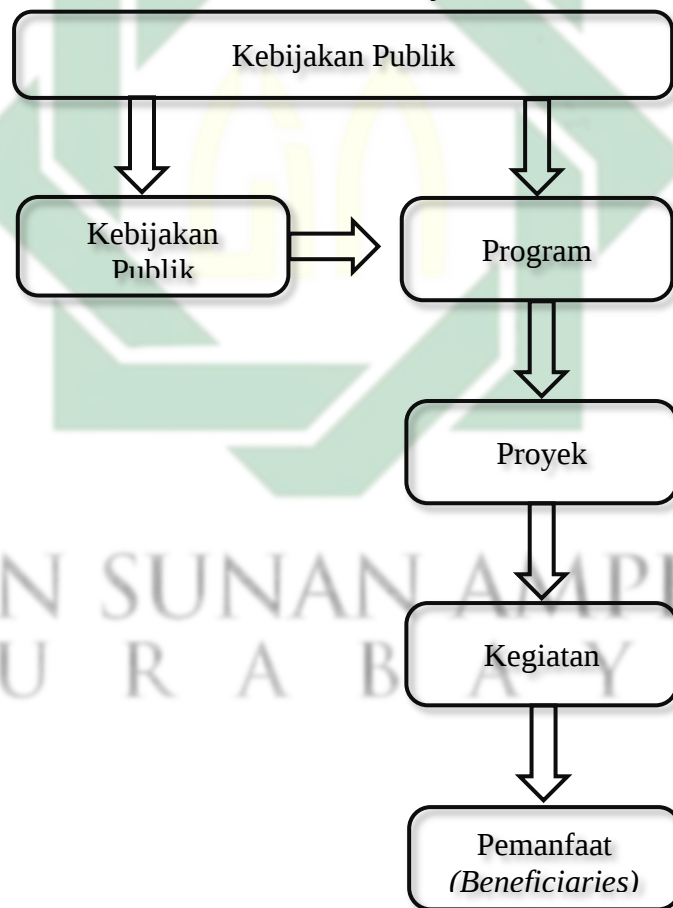
⁷⁷ Agus Subianto. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi*. (Surabaya: Brilliant, 2020), 19.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, disimpulkan bahwa unsur-unsur dari proses implementasi yakni:

1. Proses Implementasi program atau kebijakan adalah serangkaian aktivitas tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan) yang meliputi pengambilan keputusan, tahapan-tahapan strategis maupun operasional yang dilaksanakan guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, serta guna mencapai sasaran program (kebijakan) yang telah ditetapkan semula.
2. Proses implementasi sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil atau bahkan gagal, ditinjau dari wujud hasil yang dicapai, atau *outcomes*, karena dalam proses tersebut, terlibat berbagai pihak yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung ataupun menghambat pencapaian sasaran program.
3. Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yakni:
 - a. Adanya program (atau kebijakan).
 - b. Target Groups.
 - c. Unsur pelaksana (implementor).
4. Implementasi program atau kebijaksanaan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa, sehingga faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) dapat mempengaruhi proses implementasi program-program pembangunan.

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Ada dua pilihan langkah dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Pertama, adalah langsung mengimplementasikan dalam bentuk program. Kedua, melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.⁷⁸ Gambar berikut dapat menjelaskan Langkah atau sekuensi implementasi kebijakan publik.

Gambar 2.1 Skema Kebijakan Publik



Sumber: Buku Kebijakan Pulik (Eko Handono)

⁷⁸ Agus Subianto. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi*. (Surabaya: Brilliant, 2020), 101.

Pendekatan dalam studi implementasi kebijakan mulai muncul sekitar awal tahun 1970-an. Pendekatan ini bersifat *top-down*, yang mengasumsikan bahwa hal-hal yang sudah diputuskan (*policy*) adalah alternatif terbaik, dan agar mencapai hasil maka kontrol administrasi dalam pengimplementasiannya adalah hal mutlak.⁷⁹ Hargrove menyatakan bahwa selama ini studi tentang *public policy* hanya menitik beratkan pada studi tentang proses pembuatan kebijakan dan evaluasi, tetapi mengabaikan permasalahan pengimplementasian. Proses administrasi antara formulasi kebijakan dan hasil kebijakan dianggap sebagai kotak hitam (*black box*) yang tidak berhubungan dengan kebijakan, terutama karena budaya administrasi di negara Inggris yang bersifat relatif tertutup. Hingga akhir tahun 1960-an, anggapan umum bahwa mandat politik dalam *policy* sudah sangat jelas dan orang-orang administrasi akan melaksanakannya sesuai dengan yang diinginkan oleh atasannya.⁸⁰

Ciri dari pendekatan ini adalah memandang pembuatan kebijakan sebagai suatu proses yang berlangsung secara rasional. Implementasi adalah melaksanakan tujuan yang telah dipilih dengan menentukan tindakan-tindakan rasional untuk mencapai tujuan. Implementasi kebijakan merupakan proses administrasi yang terpisah dari penentuan kebijakan yang bersifat politik. Pendekatan ini juga

⁷⁹ Sahya Anggara. *Pengantar Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 232.

⁸⁰ Sahya Anggara. *Pengantar Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 233.

mengasumsikan bahwa setiap kegagalan kebijakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, harus dicari faktor-faktor kegagalan proses implementasi serta membangun mata rantai hubungan sebab akibat agar kebijakan bisa berdampak.

Secara umum, yang membuat perbedaan pendekatan dalam teori implementasi berkaitan dengan hal berikut ini.

- a. Keragaman isu-isu kebijakan atau jenis kebijakan. Isu atau jenis kebijakan yang berbeda menghendaki perbedaan pendekatan pula karena ada jenis kebijakan yang sejak awal diformulasikan sudah rumit dengan melibatkan banyak faktor dan banyak aktor. Ada pula yang relatif mudah. Kebijakan yang cakupannya luas dan menghendaki perubahan yang relatif besar tentu cara implementasi dan tingkat kesulitannya akan berbeda dengan kebijakan yang lebih sederhana.
- b. Keragaman konteks kelembagaan, yang bisa meluas menyangkut generalisasi dapat diterapkan pada sistem politik dan konteks negara yang berbeda. Kebijakan yang sama dapat diimplementasikan dengan cara yang berbeda bergantung pada sistem politik serta kemampuan sistem administrasi negara yang bersangkutan.⁸¹

⁸¹ Sahya Anggara. *Pengantar Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 233.

2. Model Implementasi Kebijakan Publik

Penejelasan model implementasi kebijakan publik dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan publik yang bersifat *top-down*, karena program sepuluh ribu wiausaha baru merupakan kebijakan yang bersifat *top-down*, sehingga diperlukan pemaparan mengenai model implementasi kebijakan publik *top-down* untuk dapat memahami lebih jauh mengenai implementasi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan. Model tersebut sebagaimana berikut:

- a. Pendekatan George Charles Edwards III: Pendekatan Masalah Implementasi (1980).

Menurut Edwards, implemantasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan (*output* dan *outcome*). Aktivitas implementasi menurutnya terdiri atas perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan, dan pemecatan karyawan, negosiasi, dan lain-lain.⁸²

Edward III mengemukakan dua pertanyaan pokok: hal-hal apa saja yang merupakan prasyarat bagi suatu implementasi yang berhasil? Apa saja yang menjadi penghambat utama terhadap keberhasilan implementasi? Berdasarkan kedua pertanyaan

⁸² Sahya Anggara. *Pengantar Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 249.

tersebut, maka dirumuskan empat faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi. Keempat faktor tersebut yakni faktor komunikasi, sumber daya (*Resources*), sikap birokrasi dan pelaksana serta struktur organisasi dan tata aliran kerja birokrasi pelaksana.⁸³

1. Komunikasi

Komunikasi sangat penting, karena suatu program hanya dapat diimplementasikan dengan baik, jika jelas bagi pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi (*clarity*) serta konsentrasi informasi yang disampaikan.

2. Resources (Sumber Daya)

Mencakup empat komponen yakni, staff yang cukup (kuantitas dan kualitas); informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan; *authority* (kewenangan) guna melaksanakan tugas dan tanggung-jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap dan komitmen pelaksana terhadap program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan komitmen pelaksana. Komitmen ini adalah Hasrat kuat pelaksana dalam menjalankan dan mencapai

⁸³ Agus Subianto. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi*. (Surabaya: Brilliant, 2020), 70.

tujuan program. Sikap dan komitmen ini penting khususnya pelaksana atau mereka yang menjadi implementor program, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi.⁸⁴

4. Struktur Birokrasi

Yaitu terdapatnya suatu SOP (*Standard Operating Procedures*), tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. Jika hal ini tidak ada, maka sulit untuk mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah bersifat ad-hoc, memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang standar. Fragmentasi yang sering terdapat di dalam organisasi harus dihindari dan diatasi melalui sistem koordinasi.

b. Model Proses Administratif dan Politik oleh Marille S. Grindle.

Berdasarkan definisi “*implementation*” dari Grindle, sebagaimana model konseptual dan kerangka pemikiran implementasi sebagai proses politik dan proses administrasi. Kerangka pemikiran tersebut disusun atas jawaban dua pertanyaan pokok, khususnya di negara berkembang pada umumnya. Pertanyaan pertama mengenai “*Content*” (isi) dari program itu sendiri. Pengaruh dapat terjadi karena isi program terhadap proses implementasi. Mungkin ada program yang pada dasarnya lebih sulit daripada program lain dalam proses implementasi. Pertanyaan

⁸⁴ Sahya Anggara. *Pengantar Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 253.

kedua mengenai “*Context*” (kondisi lingkungan) yang memiliki kaitan pengaruh atau hubungan terhadap implementasi.⁸⁵

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh dua variabel: variabel isi kebijakan (*Content variable*) dan variabel konteks kebijakan (*Context variable*). Variabel content berhubungan dengan apa terkandung dalam isi kebijakan terhadap implementasi. Adapun variabel konteks berhubungan dengan bagaimana konteks politik dan proses administratif dipengaruhi oleh kebijakan yang diimplementasikan.

- c. Pendekatan Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn: Implementasi yang Sempurna (1978).

Hogwood dan Gunn adalah penulis dari Inggris yang sangat kuat mempertahankan pendapatnya tentang pentingnya pendekatan *top-down* dalam proses implementasi, meskipun banyak kritik atas pendekatan tersebut. Bagi mereka, pendekatan *bottom-up* yang cenderung mendekati permasalahan implementasi kasus perkasus dianggap tidak menarik karena para pembuat kebijakan adalah orang-orang yang telah dipilih secara demokratis sehingga sudut pandang mereka tentang implementasi bukan suatu hal yang mencederai demokrasi. Ide dasar mereka bermula dari publikasi Gunn pada tahun 1978 yang mengkaji tentang penyebab implementasi sering mengalami kegagalan, kemudian

⁸⁵ Agus Subianto. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi*. (Surabaya: Brilliant, 2020), 46.

dikembangkan dalam tulisan yang berjudul *Policy Analysis for the Real World* (1984).⁸⁶

Mereka memberikan proposisi untuk mencapai implementasi yang sempurna bagi para pembuat kebijakan, antara lain sebagai berikut:

1. Situasi di luar badan/organisasi pelaksana tidak menimbulkan kendala-kendala besar bagi proses implementasi.
2. Tersedia cukup waktu dan sumber daya untuk melaksanakan program.
3. Tidak ada kendala dalam penyediaan keseluruhan sumber daya yang dibutuhkan, termasuk sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap tahapan implementasi.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan pada teori sebab-akibat yang valid.
5. Hubungan sebab-akibat tersebut hendaknya bersifat langsung.
6. Diimplementasikan oleh lembaga tunggal yang tidak bergantung pada lembaga-lembaga lainnya, namun jika melibatkan lembaga lain hendaknya hubungan kebergantungan antarlembaga sangat minim.
7. Adanya pemahaman yang menyeluruh dan kesepakatan atas tujuan yang hendak dicapai dan kondisi ini harus ada dalam seluruh proses implementasi.

⁸⁶ Sahya Anggara. *Pengantar Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 246.

8. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati, mungkin untuk menspesifikasikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh tiap-tiap pihak yang terlibat, dalam urutan langkah-langkah pelaksanaan secara lengkap, detail, dan sempurna.⁸⁷
- d. Pendekatan Donald Van Meter dan Carl Van Horn: Perspektif Teoretis Proses Implementasi Kebijakan (1975).

Van Metter dan Van Horn dalam teorinya berawal dari argumentasi bahwa perbedaan dalam proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang dilaksanakan. mereka menawarkan pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi serta suatu model konseptual yang menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*). Mereka menegaskan bahwa perubahan, control, dan kepatuhan bertindak adalah konsep penting dalam prosedur implementasi. Berdasarkan konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji adalah hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam suatu organisasi? seberapa besar tingkat efektivitas mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur? (hal ini berhubungan dengan kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi). Seberapa

⁸⁷ Sahya Anggara. *Pengantar Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 247.

penting keterikatan masing-masing orang dalam organisasi? (hal ini terkait dengan masalah kepatuhan).⁸⁸

Hal lain yang dikemukakan oleh kedua ahli tersebut bahwa tahapan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berhubungan. Variabel bebas tersebut: Mereka menyatakan pentingnya membedakan isi (*content*) kebijakan karena efektivitas implementasi akan sangat bervariasi bergantung pada tipe dan isu kebijakan, faktor-faktor yang memengaruhi proses implementasi juga akan sangat berbeda. Menurut mereka, tipe kebijakan akan memerlukan karakteristik proses, struktur, dan hubungan antarfaktor yang berbeda pula dalam implementasinya.

e. Pendekatan Eugene Bardach: *The Implementation Game*.

Eugene Bardach (1977) menulis hasil analisisnya dari berbagai kasus yang ia teliti tentang implementasi kebijakan.

Menurut Eugene Bardach, proses politik dalam sebuah kebijakan tidak selesai hanya pada saat penyusunannya, tetapi juga sampai pada tahap pelaksanaan kebijakan tersebut. Berbagai trik politik berlangsung saat kebijakan dijalankan, sehingga tujuan utama dari kebijakan tidak tercapai. Menurutnya, sebuah implementasi adalah suatu permainan tawar-menawar, persuasi, dan manuver dalam

⁸⁸ Agus Subianto. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi*. (Surabaya: Brilliant, 2020), 68.

kondisi ketidakpastian oleh orang dan kelompok untuk memaksimalkan kekuasaan dan pengaruh mereka.⁸⁹

Hal ini terjadi karena kontrol rasional organisasi tidak dapat berjalan dengan sendirinya pada kebijakan yang dijalankan oleh berbagai aktor dan institusi. Dengan kata lain, proses implementasi telah berpotensi memunculkan konflik kepentingan dan kekuasaan di antara para aktor pelaksananya. Untuk mengatasi atau meminimalisasi dampak buruk permainan politik tersebut, yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat yang seharusnya menjadi tujuan utama dari sebuah kebijakan, pembuat kebijakan harus memberikan perhatian ekstra pada dua hal berikut:

1. Penulisan skenario implementasi oleh pembuat kebijakan untuk memperkirakan skenario proses implementasinya berikut syarat-syarat yang dibutuhkan agar kebijakan bisa dilaksanakan dengan baik (tujuan dan sasaran yang jelas, komunikasi, pelaksananya, koordinasi antar-pelaksana, sumber daya yang cukup). Melalui skenario implementasi, kesulitan yang muncul dalam proses implementasi akan lebih mudah diantisipasi.
2. *Fixing the game* adalah politisi (*the top*) yang berkepentingan dengan pencapaian tujuan sebagaimana yang tertuang dalam kebijakan harus mengikuti keseluruhan jalannya implementasi dan segera memperbaiki penyimpangan yang terjadi di antara

⁸⁹ Sahya Anggara. *Pengantar Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 244.

para implementor (jika perlu dengan tawar-menawar, persuasi, dan manuver).⁹⁰

C. Kewirausahaan

1. Pengertian

Kewirausahaan secara etimologi berasal dari dua kata yakni wira dan usaha. Wira memiliki arti manusia unggul, teladan, pahlawan, gagah berani, berbudi luhur, pejuang, dan berwatak agung.⁹¹ Sedangkan usaha mempunyai arti bekerja, perbuatan amal, berbuat sesuatu atau aktivitas dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa untuk dijual agar memiliki keuntungan.⁹² Artinya jika ditarik arti secara harfiah wirausaha merupakan manusia yang berjuang untuk mengelola sumberdaya baik dalam bidang jasa atau barang agar memiliki keuntungan.

Selain di atas, beberapa tokoh juga berpendapat mengenai pengertian wirausaha, Thomas W. Zimmerer dan Norman M. Scarbrough menyatakan bahwa Wirausahawan merupakan orang yang membuat bisnis baru serta menanggung resiko dan ketidakpastian untuk memiliki keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mencari peluang dan menggabungkan sumber daya yang dibutuhkan untuk

⁹⁰ Sahya Anggara. *Pengantar Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 245.

⁹¹ Rusdiana. *Kewirausahaan Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 45.

⁹² Pandji Anoraga, & H. Djoko Sudantoko. *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 137.

menciptakan bisnis baru tersebut.⁹³ Peter Drucker berkata bahwa wirausaha tidak mencari resiko akan tetapi mencari peluang.⁹⁴

Coulter menyatakan kewirausahaan kerap dihubungkan dengan proses, pembuatan, menciptakan nilai, membuat produk atau jasa yang inovatif dan berorientasi untuk mendapatkan keuntungan. Suryana menyatakan kewirausahaan merupakan keterampilan kreatif dan inovatif yang menjadi dasar dan sumber daya dalam mencari peluang. Pada intinya kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*creat new and different*) dari proses berpikir kreatif dan bertindak inovatif agar peluang juga tercipta.⁹⁵

Berikut ini beberapa pengertian dari para ahli:

- a. Wirausaha merupakan manusia yang memiliki keterampilan untuk melihat dan menilai kesempatan bisnis; mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk mencari keuntungan dari usaha tersebut agar mendapatkan kesuksesan (Geoffrey G. Meredith et. Al, 1995).
- b. Joseph Schumpeter (1934) menjelaskan kewirausahaan adalah menekankan pada penciptaan atau melakukan hal-hal baru, jika melakukan sesuatu yang sudah lama paling tidak dengan cara baru, baik dalam membuat produk baru, kualitas baru, cara produksi

⁹³ Thomas W. Zimmerer dan Norman, Scarbrough. *Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Kecil*, (Erlangga, Jakarta (terjemahan) 2005), 4.

⁹⁴ Buchari Alma. *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 24.

⁹⁵ Yuyus Suryana & Kartib Bayu, *Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*, (Jakarta: Kencana, 2010), 12.

baru, sumber pasokan, pasar, dan organisasi. Schumpeter menghubungkan wirausaha dengan konsep menjalankan bisnis dan mengkombinasikan dengan berbagai sumber daya.⁹⁶

- c. Kewirausahaan merupakan aktualisasi kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah serta menemukan peluang dalam dunia usaha (Zimmerer, 1996).
- d. Stoner James (1997) mengartikan kewirausahaan adalah sebuah kemampuan dalam mengambil faktor-faktor produksi lahan kerja, tenaga kerja, dan modal guna memproduksi barang atau jasa baru. Wirausahawan harus bisa memahami peluang yang belum mendapat perhatian oleh pengusaha lain.
- e. Sejalan mengenai penciptaan hal baru dan mengambil risiko, Hisrich, Peters, dan Sheperd (2008) mengartikan sebagai proses membuat nilai baru dengan mengorbankan waktu dan kerja yang dibutuhkan, serta mau menanggung segala resiko baik fisik, keuangan, serta risiko sosial, menerima keuntungan yang dihasilkan dengan kepuasan.

Dari berbagai pandangan dan pendapat di atas bisa diambil kesimpulan, tanpa mengurangi beberapa pendapat yang belum disebut, kewirausahaan merupakan keterampilan dan kemampuan serta kemauan seseorang dalam mengambil resiko dengan membuat sesuatu

⁹⁶ Rusdiana. *Kewirausahaan Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 47.

yang baru dengan kreativitas dan inovasi serta memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mendapatkan keuntungan.

Pada zaman modern, wirausahawan merupakan orang yang merintis usahanya sendiri, mengatur dan mengorganisasi perusahaan sejak revolusi industri. Orang yang merintis usaha sendiri bisa akan memperoleh manfaat dari kajian karakteristik kewirausahaan. Kewirausahaan, dalam Bahasa Inggris sepadan dengan kata *entrepreneurship* yang sebenarnya diambil dari bahasa Perancis yaitu *entreprende* yang mempunyai arti pencipta, petualang, serta pengelola usaha. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Richard Cantillon (1755) dan dipopuler oleh pakar ekonomi J.B Say (1803) untuk menerangkan para pengusaha yang telah mengeksplorasi sumber daya ekonomis dari produktivitas rendah menuju lebih tinggi sehingga menghasilkan lebih banyak lagi. Dengan meluasnya bidang garapan maka juga semakin banyak pengertian mengenai kewirausahaan yang muncul seiring juga dengan perkembangan ekonomi.

Kewirausahaan merupakan upaya membuat nilai tambah di pasar melalui cara dan gaya baru agar bisa berkompetisi dengan yang lain. Zimmerer menyatakan untuk nilai bisa bertambah, maka dengan cara melalui langkah-langkah berikut.⁹⁷

- a. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi (*developing new technology*).

⁹⁷ Rusdiana. *Kewirausahaan Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 47.

- b. Mengembangkan dan menemukan pengetahuan baru (*discovering new knowledge*).
- c. Memperbaiki produk baik itu barang atau jasa yang ada (*improving existing products or services*).
- d. Menemukan cara berbeda dalam menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang lebih efisien. (*finding different ways of providing more goods and services with fewer resources*)

Meskipun tidak ada pengertian final dan pasti mengenai pengertian kewirausahaan (*entrepreneurship*), tetapi pada dasarnya memiliki hakikat yang nyaris sama yakni merujuk pada karakter, watak, sifat, serta ciri pada seseorang yang memiliki keinginan dalam mewujudkan gagasan kreatif dan inovatif dalam dunia usaha.

2. Karakteristik Wirausaha

Menurut Zimmerer dan Scarborough, karakteristik kewirausahaan adalah:

- a. *Desire for responsibility*, yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. Seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab akan selalu mawas diri.
- b. *Preference for moderate risk*, yaitu lebih memilih resiko yang moderat, artinya ia selalu menghindari risiko yang rendah dan menghindari risiki yang tinggi.
- c. *Confidence in their ability to success*, yaitu percaya akan

kemampuan dirinya untuk berhasil.

- d. *Desire for immediate feedback*, yaitu selalu menghendaki umpan balik yang segera.
- e. *High level of energy*, yaitu memiliki semangat dan kerjakeras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik.
- f. *Future orientation*, yaitu berorientasi ke masa depan dan berwawasan jauh ke depan.
- g. *Value of achievement over money*, yaitu memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah.
- h. *Skill at organizing*, yaitu memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah.⁹⁸

3. Tipe Wirausaha

Berbagai ahli mengelompokkan wirausaha dengan dengan berbeda-beda. Ada yang berdasarkan sifatnya, berdasarkan kegiatan usahanya, maupun berdasarkan sifat wirausahanya. Roopke mengelompokkan wirausaha berdasarkan peranannya sebagai berikut:⁹⁹

- a. Wirausaha rutin (*earth*) adalah wirausaha yang melakukan kegiatan sehari-harinya cenderung menekankan pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi. Fungsi wirausaha rutin adalah mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap standar tradisional, bukan penyusunan dan pengalokasian sumber-sumber. Wirausaha

⁹⁸ Edy Dwi Kuniati. *Kewirausahaan industri* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 133.

⁹⁹ Ibid, 140.

ini berusaha untuk menghasilkan barang, pasar, dan teknologi, misalnya seorang pegawai atau manajer. Wirausaha rutin dibayar dalam bentuk gaji.

- b. Wirausaha arbitrase adalah wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan (pengetahuan) dan pemanfaatan (pembukaan). Misalnya, dalam penawaran dan permintaan pasar tidak terjadi ekuilibrium, maka wirausaha ini akan membeli barang dengan murah dan menjualnya dengan harga mahal. Kegiatan kewirausahaan arbitrase tidak perlu melibatkan pembuatan barang dan tidak perlu menyerap dana pribadi wirausaha. Kegiatannya melibatkan spekulasi dalam memanfaatkan perbedaan harga jual dan harga beli.
- c. Wirausaha inovatif adalah wirausaha dinamis yang menghasilkan ide-ide dan kreasi-kreasi baru yang berbeda, tidak saja dalam memperkenalkan teknik dan produk baru, tetapi juga dalam pasar dan sumber pengadaan, peningkatan teknik manajemen, dan metode distribusi baru. Wirausaha mengadakan proses dinamis pada produk, proses, hasil, sumber pengadaan, dan organisasi yang baru.

Berdasarkan jenis usaha, wirausaha dapat diklasifikasikan ke dalam jenis sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Wirausaha Bisnis adalah seorang individu yang menemukan ide untuk memulai bisnis dan kemudian membangun bisnis.

¹⁰⁰ Edy Dwi Kuniati. *Kewirausahaan industri* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 142.

- b. Wirausaha Pedagang adalah seorang wirausaha yang melakukan kegiatan perdagangan yaitu; jual beli barang-barang manufaktur dan pertanian.
- c. Wirausaha Industri adalah seorang wirausaha yang melakukan pembuatan kegiatan.
- d. Wirausaha Perusahaan adalah orang yang menunjukkan keterampilan yang inovatif dalam mengatur dan mengelola suatu usaha perusahaan.
- e. Wirausaha Pertanian adalah wirausaha yang melakukan kegiatan pertanian seperti pemasaran tanaman, pupuk dan input pertanian lainnya.

Menurut Zimmerer dan Scarborough (2005), profil wirausaha berdasarkan kegiatan usahanya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

- a. *Part time entrepreneur* merupakan wirausaha yang melakukan usaha tidak secara penuh dalam kehidupannya, tetapi hanya sebagian waktu saja yang digunakan untuk menangkap peluang usaha yang ada. Kegiatan usaha seperti ini biasanya sekedar hobi.
- b. *Homebased new ventures* merupakan wirausaha yang menangkap peluang usaha dengan jalan merintis usaha dari bisnis rumahan (rumah tangga).
- c. *Family owned business* merupakan wirausaha yang dimiliki dan dirintis oleh beberapa anggota keluarga secara turun- temurun.

- d. *Copreneurs* merupakan wirausaha yang dilakukan oleh dua orang wirausaha yang bekerja sama sebagai pemilik dan menjalankan usaha bersama-sama.

Berdasarkan motivasi, wirausaha dapat diklasifikasikan ke dalam jenis sebagai berikut:¹⁰¹

- a. Wirausaha Murni merupakan wirausaha yang percaya pada kinerja mereka sendiri saat melakukan kegiatan bisnis. Wirausaha murni melakukan usaha bisnis untuk kepuasan, status, dan ego pribadi mereka. Wirausaha tersebut didorong oleh motif keuntungan.
- b. Wirausaha Induksi adalah wirausaha yang didorong untuk mengambil suatu kegiatan kewirausahaan melalui pemanfaatan program dari pemerintah, seperti: dalam bentuk bantuan, insentif, subsidi, dan prasarana.
- c. Wirausaha Termotivasi merupakan wirausaha yang termotivasi oleh keinginan untuk memanfaatkan keahlian dan keterampilan teknis profesional mereka. Mereka termotivasi oleh keinginan untuk pemenuhan diri.
- d. Wirausaha Spontan merupakan wirausaha jenis ini termotivasi oleh keinginan mereka untuk kerja mandiri, mencapai atau membuktikan keunggulan mereka dalam prestasi kerja. Mereka adalah wirausaha alami.

Berdasarkan penggunaan teknologi, wirausaha dapat

¹⁰¹ Edy Dwi Kuniati. *Kewirausahaan industri* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 143.

diklasifikasikan ke dalam jenis sebagai berikut:¹⁰²

- a. Wirausaha Teknis yakni wirausaha dengan yang sangat berorientasi tugas. Wirausaha tersebut merupakan tipe pengrajin. Wirausaha yang mengembangkan kualitas barang baru lebih baik karena keahlian mereka. Mereka berkonsentrasi lebih pada produksi dibandingkan pada pemasaran.
- b. Wirausaha Non-Teknis merupakan wirausaha yang tidak peduli dengan aspek teknis produk. Mereka mengembangkan teknik pemasaran dan strategi distribusi untuk mempromosikan bisnis mereka. Dengan demikian mereka lebih berkonsentrasi pada aspek pemasaran.

4. Kewirausahaan dalam Perspektif Islam

Kewirausahaan dalam Islam terdiri dari dua konsep yakni Islam dan kewirausahaan. Islam dalam artian yang paling sederhana pernyataan dan keyakinan pada Allah dan Rasulnya yaitu Nabi Muhammad. Wirausahaan merupakan seseorang yang mencari peluang serta siap dengan resiko dalam usahanya.¹⁰³ Kewirausahaan dalam pandangan Islam didukung oleh tiga pilar. Pilar pertama adalah hubungan manusia dengan Allah, dengan pilar ini kewirausahaan sebagai wahana untuk mencapai rida Allah. Spritualitas agama memainkan peran penting pada pilar ini. Pilar kedua merupakan mengejar terbukanya peluang yang luas. Pada pilar kedua selaras

¹⁰² Edy Dwi Kuniati. *Kewirausahaan industri* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 143.

¹⁰³ Abd. Ghafur dan Saifuddin Syuhri. "Entrepreneurship Perspektif Islam". *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No.1, (April, 2022), 80.

dengan konsep kewirausahaan bahwa seorang pelaku usaha mengeksplorasi kesempatan dengan menggunakan ulang sumber daya yang ada. Sedangkan pilar terakhir yakni sosial ekonomi atau nilai etika. Kewirausahaan dalam perspektif Islam dipandu oleh sekumpulan norma, nilai, dan perilaku terpuji.¹⁰⁴

Perbedaan antara wirausaha Islam dan konvensional adalah dalam Islam proses pengelolaan suatu usaha diniatkan sebagai ibadah dengan tujuan mencapai kemaslahatan hidup. Artinya pada setiap tahapan dalam usaha bersandar pada esensi spiritualitas Islam. Berbeda dengan kewirausahaan konvensional yang mengutamakan keuntungan setinggi-tingginya tanpa melihat nilai etis dalam proses berwirausaha. Peran spiritualitas Islam dengan dasar keimanan kepada Allah SWT akan membentuk sikap yang orientasinya sebagai bentuk ibadah. Melalui paradigma tauhid maka diharapkan terwujudnya hubungan yang harmoni di antara dunia dan akhirat dalam konteks kewirausahaan.¹⁰⁵ Spiritualitas Islam yang dimiliki setiap manusia dapat dikembangkan agar lebih bermanfaat dan berdaya guna sebagai motivasi hingga tindakan dalam pencapaian tujuan kehidupan di dunia.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan wirausaha. Kegiatan bisnis dengan berbagi inovasi merupakan langkah untuk menjaga eksistensi seorang muslim dan akidah yang dibawanya ditengah-tengah hegemoni masyarakat global. Selain itu semua

¹⁰⁴ Hanifiyah Yuliatul Hijriah. "Spiritualitas Islam dalam Kewirausahaan". *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 12, No. 1, (Mei, 2016), 192.

¹⁰⁵ Ibid, 192.

perjuangan dakwah agama Islam tidak bisa begitu saja berjalan tanpa dukungan finansial yang kuat. Oleh karena itu, Islam memberikan tempat mulia dan tinggi kepada *entrepreneur* muslim yang jujur dan amanah. Peran pengusaha dalam dakwah agama Islam sangat penting. Mendorong lahirnya *entrepreneur* muslim modern dengan menggali segala potensi yang dimiliki agar menggapai kesuksesan baik potensi kreativitas, modal, fisik, waktu, dan pengorbanan yang besar juga diharapkan bisa membantu dakwah agama Islam.¹⁰⁶

Kewirausahaan dalam perspektif Islam merupakan rangkaian aktivitas yang memiliki banyak bentuk, namun ada batasan terkait cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Islam mengajarkan penerapan prinsip-prinsip syariah di dalam entitas usaha. Pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syariat yakni aturan-aturan dalam al-Qur'an dan hadis. Syariat merupakan nilai utama yang menjadi pedoman bagi wirausaha dalam melaksanakan kegiatan bisnis baik langkah strategis ataupun taktis.¹⁰⁷

Islam memberikan pedoman utamanya dalam kewirausahaan sebagai landasan pemikiran dan praktek bagi seorang Muslim, yakni al-Qur'an dan Sunnah.¹⁰⁸ Al-Qur'an merupakan rujukan utama bagi umat Islam sebagai firman Tuhan yang literal. Manusia bertanggung

¹⁰⁶ Zahid Mubarak, Hendri Tanjung, dan Abbas Mansur Tamam. "Konsep Pendidikan Wirausaha dan Kemandirian bagi Anak Panti Asuhan". *Ta'dibuna*, Vol. 6, No. 1, (April, 2017), 104.

¹⁰⁷ Hanifiyah Yuliatul Hijriah. "Spiritualitas Islam dalam Kewirausahaan". *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 12, No. 1, (Mei, 2016), 195.

¹⁰⁸ Abd. Ghafur dan Saifuddin Syuhri. "Entrepreneurship Perspektif Islam". *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No.1, (April, 2022), 81.

jawab untuk mengejar peluang serta sumber daya yang mereka kuasai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia akan memperoleh hasil prestasi sesuai dengan usaha yang dilakukan.¹⁰⁹ Seperti yang tercantum dalam QS An-Najm: 39-40:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى

Artinya: *"Dan bahwa setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang mereka usahakan. Dan bahwa (hasil) dari upaya mereka akan terlihat dalam catatan mereka."*

Islam juga menganjurkan untuk mencari apa yang telah diberikan oleh Allah untuk kepentingan akhirat yakni dengan pahala yang dihasilkan oleh harta yang digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Dalam Islam manusia diperkenankan untuk mengambil bagian dari dunia dalam mencukupi kebutuhan dan bekerja sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dengan demikian, seorang wirausahawan harus seimbang antara menjalani aktivitas usahanya dan ibadah kepada Allah SWT.¹¹⁰ Hal tersebut dapat dicerminkan dalam Alquran surat Al-Jumu'ah ayat 9-11, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا

¹⁰⁹ Elfa Yuliana. "Kewirausahaan dalam Perspektif Islam". *Ta'dib*, Vol. 15, No. 2, (Juli-Des, 2017), 32.

¹¹⁰ Fikri Maulana. "Pendidikan Kewirausahaan dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 01, (2019), 41.

أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِو وَمِنَ التَّجَرَّةِ وَاللَّهُ خَيْرُ

الرَّزْقَيْنِ

Artinya: *Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki.*

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, Allah memerintahkan manusia untuk tidak melupakan bagian dari usaha dunia, maka dengan ayat tersebut secara kontekstual Allah SWT juga memerintahkan untuk tekun bekerja. Islam mengajarkan umatnya untuk mujahadah (bersungguh-sungguh) dalam beramal atau bekerja di jalan Allah, memiliki kesungguhan dalam berusaha, dan Allah SWT telah berjanji akan menunjukkan jalan keluar dari setiap problem yang dihadapinya serta memberikan pertolongan. Meski pun demikian, hal yang perlu diingat adalah tujuannya untuk mencari keridhaan Allah sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak.¹¹¹

Dalam Al- Qur'an sudah jelas tentang pentingnya entrepreneurship atau wirausaha sehingga dapat dijadikan dasar dalam memotivasi umat Islam untuk menjadi wirausaha-wirausaha baru.

¹¹¹ Fikri Maulana. "Pendidikan Kewirausahaan dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 01, (2019), 40.

Ajaran Islam sangat menganjurkan manusia untuk selalu berusaha. Untuk mencapai kesuksesan dalam usahanya tersebut maka seseorang harus mau bekerja keras, mau bekerja sama dengan orang lain, memiliki sifat jujur, disiplin, keyakinan diri, pandai membuat keputusan, mau menambah ilmu pengetahuan, dan berkomunikasi.¹¹²



¹¹² Elfa Yuliana. "Kewirausahaan dalam Perspektif Islam". *Ta'dib*, Vol. 15, No. 2, (Juli-Des, 2017), 32.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan

1. Gambaran Geografi

Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten yang berada di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Pamekasan diapit di antara dua kabupaten, yakni Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep. Secara astronomis Kabupaten Pamekasan terletak antara 6°51' – 7°31' Lintang Selatan dan antara 113°19' – 113°58' Bujur Timur yang memiliki luas 792, 30 km².¹¹³ Sedangkan Batas wilayah Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Batas-batas wilayah Kabupaten Pamekasan

Wilayah	Keterangan
Sebelah Utara	Laut Jawa
Sebelah Timur	Kabupaten Sumenep
Sebelah Selatan	Selat Madura
Sebelah Barat	Kabupaten Sampang

Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan juga terletak pada perlintasan jalur jaringan jalan Sampang-Sumenep. Secara garis besar wilayah Kabupaten Pamekasan terdiri dari dataran rendah pada bagian selatan

¹¹³ Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, Tahun 2021, 3.

dan dataran tinggi di wilayah tengah dan utara dengan kemiringan lahan tidak lebih rendah dari 2%. Kondisi topografi Kabupaten Pamekasan didasarkan atas ketinggian dan kelerengan, di mana ditinjau dari kondisi topografi ini Kabupaten Pamekasan terletak di ketinggian 0-340 meter di atas permukaan laut. Wilayah tertinggi yaitu Kecamatan Pegantenan yang berada pada ketinggian 312 meter di atas permukaan laut, sedangkan wilayah terendah yaitu Kecamatan Galis berada pada ketinggian 6 meter di atas permukaan laut.¹¹⁴

Rincian wilayah Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Rincian Wilayah Kabupaten Pamekasan

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tlanakan	17	17	17	17	17
Pademawu	22	22	22	22	22
Galis	10	10	10	10	10
Larangan	14	14	14	14	14
Pamekasan	18	18	18	18	18
Propo	27	27	27	27	27
Palengaan	12	12	12	12	12
Pegantenan	13	13	13	13	13
Kadur	10	10	10	10	10
Pakong	12	12	12	12	12
Waru	12	12	12	12	12
Batumarmar	13	13	13	13	13
Pasean	9	9	9	9	9
Kabupaten Pamekasan	189	189	189	189	189

Sumber: Kabupaten Pamekasan dalam Angka, Tahun 2021.

¹¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pamekasan

Secara umum sampai pada akhir tahun 2020 Kecamatan yang wilayahnya paling luas adalah Kecamatan Batumarmar, yaitu sekitar 97,05 km². Sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Pamekasan dengan luas wilayah 26,47 km². Sedangkan untuk desa di Kabupaten Pamekasan terdiri dari 178 Desa, serta 11 kelurahan.

2. Gambaran Demografi

Penduduk kabupaten Pamekasan menurut hasil sensus penduduk tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebesar 850.057 jiwa, yang terdiri atas 416.961 jiwa penduduk laki-laki dan 433.096 jiwa penduduk perempuan. Untuk rasio jenis kelamin di Kabupaten Pamekasan dapat diinterpretasikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 96 hingga 97 penduduk laki-laki. Penduduk di Kabupaten Pamekasan terus mengalami peningkatan tiap tahun.¹¹⁵

Sedangkan untuk kepadatan penduduk pada tahun 2020 di kabupaten pamekasan telah mencapai 1.072,99 jiwa/km. Untuk kepadatan tertinggi terletak di Kecamatan Pamekasan sebesar 3.362,94 jiwa/km dan kepadatan terendah di Kecamatan Pasean sebesar 727,80 jiwa/km.

Berikut tabel laju pertumbuhan penduduk dan distribusi persentase penduduk di 13 Kecamatan di Kabupaten Pamekasan:

¹¹⁵ Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, Tahun 2021, 53.

Tabel 3.3 Persentase Penduduk di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Penduduk (ribu) <i>Population</i> (<i>thousand</i>)	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010-2020 <i>Annual Population</i> <i>Growth Rate (%)</i> 2010-2020
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	64 122	0,81
Pademawu	84 803	1,01
Galis	29 770	0,53
Larangan	56 553	0,62
Pamekasan	89 017	-0,01
Proppo	84 864	1,23
Palengaan	82 600	-0,31
Pegantenan	73 686	1,58
Kadur	47 959	0,72
Pakong	36 817	0,67
Waru	64 394	0,82
Batumarmar	79 519	0,24
Pasean	79 519	0,24
Kabupaten Pamekasan	850 057	0,66

Sumber: Kabupaten Pamekasan dalam Angka, Tahun 2021.

3. Gambaran Pemerintahan

Kabupaten Pamekasan memiliki 45 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, dengan rincian 43 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Dilihat dari organisasi politik, anggota DPRD periode ini (2019-2024) terdiri dari 7 fraksi, yakni fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan 12 orang, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan 7 orang, fraksi Partai Demokrat 6 orang, fraksi Partai Keadilan Sejahtera 5 orang, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 4 orang, fraksi Madani 7 orang, dan fraksi Nasdem Amanat Nasional 4 orang. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD Kabupaten Pamekasan dibentuk 4 komisi, yakni komisi hukum dan

pemerintahan, ekonomi dan keuangan, pembangunan dan infrastruktur, serta kesejahteraan rakyat.¹¹⁶

Sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan hingga tahun 2020 berjumlah 6.420 orang. Dengan rincian pegawai laki-laki 3.637 orang, sedangkan pegawai perempuan sebanyak 2.783 orang. Dari total jumlah pegawai tersebut, sebanyak 4.500 merupakan pejabat fungsional tertentu dan 1.178 adalah pejabat fungsional umum, serta 742 merupakan pejabat struktural.¹¹⁷ Susunan Pemerintahan Kabupaten Pamekasan periode ini (2018-2023) terdiri dari bupati, wakil bupati, Lembaga tinggi daerah, kantor kementerian, dinas, dan Lembaga pemerintahan dan kementerian.¹¹⁸

B. Deskripsi Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru di Kabupaten Pamekasan

1. Latar Belakang dan Tujuan Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru

Program pembinaan sepuluh ribu wirausaha baru serta calon pengusaha baru merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Pamekasan di sektor ekonomi. Program tersebut diharapkan dan ditargetkan untuk mengurangi pengangguran serta menciptakan peluang berwirausaha. Program sepuluh ribu wirausaha baru merupakan salah satu misi Bupati Pamekasan yakni

¹¹⁶ <http://sekwan.pamekasankab.go.id/> diakses 02 Juli 2022.

¹¹⁷ Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, Tahun 2021, 23.

¹¹⁸ Ibid, 21.

perekonomian inklusif yang bertumpu pada sektor pertanian dan didukung percepatan pembangunan sektor industri, perdagangan dan sektor potensial lainnya.

Latar belakang dalam pembuatan program sepuluh ribu wirausaha baru adalah hasil dari pembacaan kondisi madura, khususnya Kabupaten Pamekasan dari masa ke masa. Menurut Bupati Pamekasan latar belakang program sepuluh ribu wirausaha baru yakni:

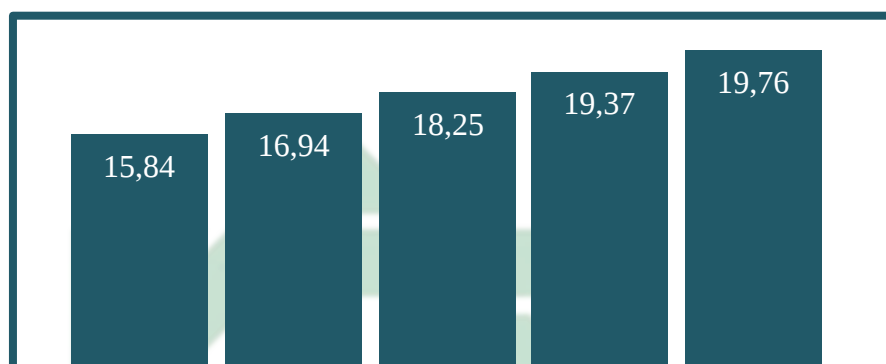
“Berangkat dari realitas, jadi begini, membaca Madura juga membaca Pamekasan jangan hanya di era 2018 sampai era 2023 atau 2024. Membaca Madura ini harus lengkap, membaca Pamekasan juga harus lengkap, dari zaman ke zaman. Misalnya Pamekasan di era zaman 2000-an, di era abad 19 awal, dan terus Madura di era pra-kemerdekaan, kemerdekaan, era awal kemerdekaan, era kepemimpinan Soeharto, era reformasi dan seterusnya. Setelah membaca lengkap itu ketemu tiga prinsip yang pertama etos; semangat Madura, yang kedua orang Madura ini cita-citanya sederhana ingin sejahtera, lalu kemudian yang ketiga spritualitas orang Madura ini bagus. Dari tiga prinsip ini maka orang Madura ini, orang Pamekasan ini perlu terfasilitasi karena memiliki etos dan ingin sejahtera. Baru kemudian muncul pertanyaan kira-kira program pemerintah apa yang bisa mengapresiasi atau menyediakan ruang yang cukup untuk etos ini dan kesejahteraan, baru di hitung lagi potensi indutri dan UMKM apa saja yang perlu kita dorong, dan ketemu dorong UMKM. Setelah kita ketemu UMKM, kira-kira kemiskinan di Madura ini berapa, lapangan pekerjaan yang perlu disiapkan berapa, baru ketemunya di program wirausaha. Wirausaha apa yang mau kita lakukan ketemunya di WUB (Wirausaha Baru), wirausaha baru ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa daerah tapi kita kan perlu wirausaha yang tidak hanya tunggal tapi dari hulu sampai hilir selesai. Maka dibuatlah konsep saputangan biru yakni sepuluh ribu wirausaha baru”.¹¹⁹

¹¹⁹ H. Baddrut Tamam (Bupati Pamekasan), *Wawancara*, di Pendopo Bupati Pamekasan, 21 Juli 2022.

Selain melihat kondisi Madura dan Pamekasan dari etos kerja, keinginan kuat untuk sejahtera, dan spritualitas yang tinggi. Latar belakang program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan juga melihat kemiskinan masyarakat Kabupaten Pamekasan. Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah dalam satuan rupiah setiap tahun. PDRB per kapita Kabupaten Pamekasan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terus mengalami peningkatan. PDRB per kapita menjadi acuan dalam menghitung besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk dalam suatu wilayah. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan dengan jumlah seluruh penduduk dalam suatu wilayah. Pada tahun 2016 posisi PDRB berada pada 15,84 dan menjadi 19,76 pada tahun 2020. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2017-2018 yang mengalami peningkatan sebanyak 1,31. Peningkatan terendah terjadi pada tahun 2019-2020 yang mengalami peningkatan hanya sebesar 0,39. Produk domestik regional bruto adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan,

memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah.¹²⁰

Gambar 3.1 PDRB Kabupaten Pamekasan



Sumber: Pamekasan dalam angka 2021.

Program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan diharapkan bisa mendorong ekonomi masyarakat bawah. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pamekasan:

“Program ini merupakan keinginan Bupati Pamekasan dalam menyejahterakan masyarakat dengan konsep sejahtera dari bawah, merata, dan berkelanjutan. Oleh karena itu melihat masyarakat pamekasan yang notabennya ekonominya ditopang oleh UMKM dan yang menyumbang paling banyak pada PDRB merupakan sektor pertanian, barang dan jasa, perdagangan dan konstruksi. Oleh karena itu untuk menguatkan ekonomi masyarakat bawah melalui program sepuluh ribu wirausaha baru tersebut”.¹²¹

Asumsi sepuluh ribu juga bagian dari ikhtiar Bupati Pamekasan dalam mendorong ekonomi masyarakat dari bawah. Menurut Bupati Pamekasan:

¹²⁰ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023.

¹²¹ Taufikurrahman (Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pamekasan), *Wawancara*, di kantor BAPPEDA Kabupaten Pamekasan, 18 Juli 2022.

“Kalau kita hitung selama 5 tahun dan dibagi 5 maka 10.000 itu hasilnya 2000. Jika 2000 pertahun dibagi lagi, dengan asumsi 200 desa sama halnya 10 perdesa, 10 orang perdesa kita latih dalam 5 tahun maka 50 orang, dengan asumsi jika penduduk desa itu ada 1000 orang berarti masih 0,5 % dari masyarakat desa yang kita latih, itu hitungan kita semua. Baru setelah itu kita buat strateginya, yakni strategi desa terlatih. Nah, tujuan akhirnya adalah makmur dari desa, makmur dari rumah, makmur dari kampung-kampung”.¹²²

Setelah gagasan program sepuluh ribu wairausaha baru dibuat maka untuk merealisasikan program tersebut dibuatlah beberapa strategi. Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam menjalankan program dan menumbuhkan sepuluh ribu wairausaha baru, menurut Bupati Pamekasan sebagaimana berikut:

“Setelah ada gagasan sepuluh ribu wairausaha baru, konsep itu, orang Madura inikan biasanya begini setelah dilatih, pada umumnya, pemerintahan ini merasa selesai sudah di latih, terus urusan mesinnya gimana wes cari sendiri, nah urusan modalnya cari sendiri, urusan pasarnya cari sendiri. Tapi menurut saya di kepemimpinan ini tidak bisa begitu cara kita, kita ini harus melatih orang setelah orang bisa terus kita berfikir lagi, gimana alatnya? Mangkanya CSR yang dari Himbara dan beberapa korporasi itu, saya memilih tidak digunakan untuk sektor pembangunan, tetapi saya pilih untuk sektor kesejahteraan. Caranya kita minta ke CSR ini yang sudah dilatih ini biar mendapat alat produksi, karena APBD kita ini kalau semuanya diberikan alat produksi ya mesti tidak cukup, mesti akan mengurangi yang lain. Baru kemudian kita beri pinjaman modal dengan bunga murah dan kita carikan pasar. Alur ini sudah benar konsepnya, konsep benar nih. Tetapi tidak sedikit mental masyarakat itu mental *steckholders* (penulisannya mungkin salah) yang setelah dilatih itu ya merasa sudah selesai. Yang dilatih mikirnya pelatihan beberapa hari, terus kemudian tidur di hotel, dapet bloknote, dapet tas, dapet uang saku, itu tidak sedikit yang begitu tapi banyak yang berfikir begitu. Yang paling berat di sektor pembangunan apapun itu merubah mindset,(merubah etos, etosnya sudah dapet) merubah pola

¹²² H. Baddrut Tamam (Bupati Pamekasan), *Wawancara*, di Pendopo Bupati Pamekasan, 21 Juli 2022.

pikir, orang disuruh jadi pengusaha kalau dia mindsetnya bukan pengusaha ya ga bisa, orang di suruh jadi petani kalau passionnya bukan petani ya ga bisa. Nah, seleksi untuk menentukan passion semangat untuk jadi pengusaha itu kan juga tidak mudah, maka ada fasilitator. Fasilitator tujuannya apa, biar kemudian ASN tetap bekerja sebagai mesin pemerintahan sebagai mesin Negara ini bekerja. Tapi fasilitator ini melakukan serap informasi, serap aspirasi dari masyarakat kira-kira di desa ini ingin apa. Contohnya jika ingin usaha sandal ayo kita diskusi tentang sandal, setelah diskusi, ketemu, baru kemudian pelatihan soal sandal”.¹²³

Madura khususnya Pamekasan bagi sebagian orang adalah merupakan pasar besar bagi produk-produk baik itu makanan ataupun non makanan. Mulai dari kebutuhan pokok sampai dengan kebutuhan lainnya didominasi oleh produk-produk dari luar Pamekasan. Hal ini bisa terlihat jika kita masuk ke dalam sebuah toko yang menjual kebutuhan masyarakat, mayoritas produk-produk yang dijual adalah produk dari luar yang didatangkan oleh para distributor dan hanya sedikit produk dari masyarakat Pamekasan. Dengan demikian perputaran uang secara tidak langsung perputaran uang terjadi di luar Pamekasan. Hal ini tanpa disadari terjadi mulai zaman dahulu sampai dengan sekarang. Jika hal ini dibiarkan maka yang memperoleh keuntungan adalah para distributor sementara masyarakat Pamekasan hanya akan menjadi penikmat karena bersifat konsumtif. Ini adalah peluang besar bagi masyarakat Pamekasan untuk dapat tumbuh dan berdiri di kaki sendiri untuk dapat memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat Pamekasan. Dengan hadirnya program sepuluh

¹²³ H. Baddrut Tamam (Bupati Pamekasan), *Wawancara*, di Pendopo Bupati Pamekasan, 21 Juli 2022.

ribu wirausaha baru diharapkan menjadi pendorong kemandirian masyarakat untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Terlebih saat ini dengan adanya pandemi Covid-19 pada 2 tahun terakhir yang melanda seluruh lapisan masyarakat semakin menambah melemahnya ekonomi masyarakat yang disertai dengan naiknya angka pengangguran di Kabupaten Pamekasan. Program sepuluh ribu wirausaha baru merupakan solusi untuk menumbuhkan perekonomian, alasannya menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan adalah:

“Program wirausaha sebenarnya sudah ada, akan tetapi program sepuluh ribu wirausaha baru yang saat ini lebih terintegrasi dan detail. Kalau sebelumnya hanya pelatihan saja, dilatih dan dicatat saja, serta tidak ada target. Program ini bagus karena Pamekasan dan Madura secara umum dalam perekonomian wilayah belum memiliki industri, sehingga kabupaten secara formal tidak bisa membuat industrialisasi. Kita justru melihat adalah UMKM masyarakat yang tumbuh, makanya kekuatan utama adalah menguatkan UMKM masyarakat. Karena investor yang datang juga pulang. Jika program ini dilakukan secara tertib dan terus menerus, saya optimis ketahanan ekonomi di Pamekasan akan bagus, karena orang akan terus mencari penghasilan yang mapan dan alternatifnya melalui UMKM.”¹²⁴

Visi Bupati Pamekasan adalah Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama. Oleh karena itu program sepuluh ribu wirausaha baru menjadi program prioritas pembangunan di sektor ekonomi. Program sepuluh ribu wirausaha baru dilaksanakan selama 4 tahun masa efektif

¹²⁴ Taufikurrahman (Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pamekasan), *Wawancara*, di kantor BAPPEDA Kabupaten Pamekasan, 18 Juli 2022.

kepemimpinan Bupati Pamekasan H. Badrut Tamam, S.Psi yang dimulai pada tahun 2020 dan berakhir pada tahun 2023 dengan target 10.000. Oleh karenanya program ini juga dikenal dengan istilah Saputangan Biru yaitu Penumbuhan Sepuluh Ribu Wirausaha Baru atau juga disebut dengan wirausaha baru (WUB).

2. Landasan Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru

Sebagai upaya nyata hadirnya pemerintah dalam penumbuhan wirausaha baru di kabupaten Pamekasan, maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan menuangkan program tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan:

“Program sepuluh ribu wirausaha baru tertuang dalam RPJMD, sedangkan RPJMD diambil dari janji politik yang telah disetujui unsur politik melalui peraturan daerah. Nanti birokrasi yang menjalankan dan Bappeda mempunyai tugas untuk menjait rumusan keinginan bupati sampai menjadi program kegiatan di dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD)”.¹²⁵

RPJMD 2018-2023 adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan.¹²⁶ RPJMD Kabupaten Pamekasan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan

¹²⁵ Taufikurrahman (Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pamekasan), *Wawancara*, di kantor BAPPEDA Kabupaten Pamekasan, 18 Juli 2022.

¹²⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 1 Tahun 2022.

program prioritas pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih H. Baddrut Tamam, S.Psi dan Raja'e, S.Hi. yang telah dilantik secara sah menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 24 September 2018. Dokumen RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 akan dijadikan sebagai acuan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan perencanaan tahunan dan juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, sebagai bentuk pelaksanaan RPJMD dan keselarasan perencanaan tahunan dengan perencanaan jangka menengah serta keselarasan perencanaan tingkat pemerintah daerah dengan perencanaan tingkat perangkat daerah.¹²⁷

Program Pembinaan Sepuluh Ribu Wirausaha Baru dan Calon Wirausaha Baru (Sapu Tangan Biru) tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023 pada BAB VI. Dalam dokumen tersebut juga disajikan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Rumusan strategi menjelaskan cara dan tahapan implementasi bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan memperhatikan dinamika kondisi internal dan eksternal Daerah. Sedangkan arah kebijakan menjelaskan waktu pelaksanaan (*Timeline*) dari strategi yang telah ditentukan dalam kurun waktu lima tahun periode RPJMD. Penentuan Arah Kebijakan yang tepat diharapkan dapat menentukan

¹²⁷ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023.

Tema Pembangunan Tahunan dalam RKPD. Oleh karena itu, strategi yang diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan yang tepat dapat menjelaskan keterkaitan logis kontribusi setiap urusan/program terhadap pencapaian Visi dan Misi RPJMD.¹²⁸ Point yang tertuang dalam RPJMD Program sepuluh ribu wirausaha baru sebagai berikut:

- a. Mengurangi pengangguran dengan menciptakan peluang berwirausaha berbasis potensi desa;
- b. Membangun kerjasama pelatihan wirausaha dengan kementerian/lembaga, BPWS, CSR perusahaan, dll;
- c. Memajukan perusahaan yang telah beroperasi untuk menjalankan fungsi sebagai Balai Latihan Kerja bagi calon tenaga kerja lokal;
- d. Optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja untuk menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan menghasilkan tenaga kerja bersertifikat;
- e. Mendorong terbentuknya komunitas baru berbasis ekonomi melalui Program “Millennial Talent Hub” sebagai fungsi Balai Latihan Kerja;
- f. Penguatan regulasi dan kebijakan dalam rangka kemudahan investasi padat modal atau padat karya;
- g. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dalam rangka iklim investasi yang baik dan kondusif;

¹²⁸ Ibid.

- h. Meningkatkan komunikasi dan promosi investasi bersama para investor melalui forum pengusaha besar maupun kecil;
- i. Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dalam rangka penyerapan tenaga kerja;
- j. Penyediaan dan Optimalisasi Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera);

C. Implementasi Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru di Kabupaten Pamekasan

1. Skema dan Realisasi Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru di Kabupaten Pamekasan

Lembaga yang menjalankan program sepuluh ribu wirausaha baru adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan:

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan ditunjuk sebagai *leader* program sepuluh ribu wirausaha baru. Setelah itu ada namanya *cross cutting* tempat bertemunya beberapa program antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Wirausaha baru yang melatih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan, tetapi juga dinas lain juga ada”.¹²⁹

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten

¹²⁹ Taufikurrahman (Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pamekasan), *Wawancara*, di kantor BAPPEDA Kabupaten Pamekasan, 18 Juli 2022.

Pamekasan untuk menumbuhkan sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan berikut strateginya:

“Jadi strategi penumbuhan wirausaha baru, pertama masyarakat diberi pelatihan, diberi ilmunya tentang caranya bagaimana menjadi wirausaha. Bagaimana caranya membuat produk itu dilatih kemudian setelah dilatih diberikan bantuan alat, bantuan alatnya dari program CSR perbankan yang dikomandani oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), setelah diberi bantuan alat kemudian dibantu modalnya melalui bank UMKM yang dalam hal ini ditangani oleh dinas koperasi, jadi saling keterkaitan, dilatih, diberi bantuan alat, diberi pinjaman modal dengan bunga 1% terus kemudian difasilitasi kelengkapan lain seperti perizinan dan sebagainya”.¹³⁰

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan untuk menumbuhkan sepuluh ribu wirausaha baru diimplementasikan dalam beberapa bentuk kegiatan seperti pelatihan, pemagangan, workshop, bimtek, dan pendampingan.¹³¹

Berikut tahapan program sepuluh ribu wirausaha baru:

a. Pra pelatihan

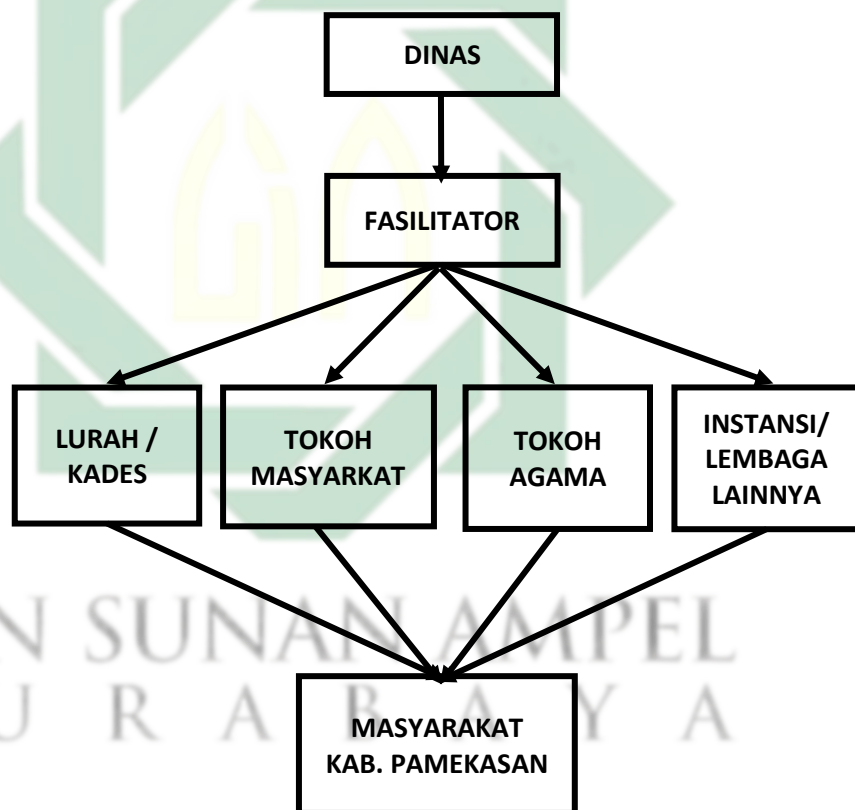
1. Realisasi pertama dalam implementasi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan adalah sosialisasi program. Sosialisasi tersebut dengan cara memperkenalkan program dan mencari jenis pelatihan yang sesuai dengan

¹³⁰ Supriyanto (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan), *Wawancara*, di Kantor DPMPTSP dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan, 21 Juli 2022.

¹³¹ Supriyanto (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan), *Wawancara*, di Kantor DPMPTSP dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan, 21 Juli 2022.

minat dan kebutuhan masyarakat. Setelah melakukan sosialisasi selanjutnya menyeleksi peserta wirausaha baru bekerja sama dengan kepala desa, tokoh masyarakat, dan kecamatan untuk mencari potensi yang bisa digarap atau digali di desa. Berikut skema sosialisasi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan:

Gambar 3.2 Skema program



2. Fasilitaor

Fasilitator pada program sepuluh ribu wirausaha baru di kabupaten pamekasan sebanyak 42. Masing-masing tersebar pada 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Setiap

kecamatan memiliki 3 orang fasilitator, kecuali Kecamatan Proppo, Kecamatan Pamekasan, dan Kecamatan Pademawu, karena memiliki jumlah desa lebih banyak daripada kecamatan yang lain. Menurut kepala Dinas (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan:

“Jadi fasilitator ada SK dan kontrak kerja sama dengan dinas serta diberi honor, kontraknya tahunan terus nanti bisa diperpanjang lagi. Kegiatan pelatihan ini kalau dilaksanakan oleh dinas kan tidak mungkin karena ada di selatan sementara masyarakat kita yang ada di utara kan banyak juga, oleh karena itu konsep pelatihannya mendakatkan kepada masyarakat, ke pelosok-pelosok, di kantor kecamatan dan bisa di balai desa atau dirumah-rumah penduduk, intinya kita tidak ingin merepotkan masyarakat tentang kegiatan pelaksanaan pelatihan ini”.¹³²

Kegiatan pra pelatihan diperlukan untuk pemetaan tentang jenis-jenis usaha yang mempunyai prospek pasar yang sangat dibutuhkan masyarakat atau disesuaikan dengan trend yang terjadi di masyarakat baik itu pelatihan di sektor jasa ataupun pelatihan yang menghasilkan produk. Oleh karena itu fasilitator dibentuk untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pemetaan tentang jenis-jenis usaha yang mempunyai prospek pasar yang sangat dibutuhkan masyarakat atau disesuaikan dengan trend yang terjadi di masyarakat;

¹³² Supriyanto (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan), *Wawancara*, di Kantor DPMPTSP dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan, 21 Juli 2022.

- b. Mensosialisasikan kegiatan penumbuhan wira usaha baru kepada masyarakat melalui camat, kepala desa dan tokoh masyarakat;
 - c. Menyusun rencana kegiatan pelatihan yang meliputi jenis pelatihan, peserta pelatihan, waktu pelatihan tempat pelatihan dan instruktur pelatihan;
 - d. Merekrut calon peserta calon wirausaha baru;
 - e. Membentuk paket-paket pelatihan sesuai dengan peminatan masyarakat dengan jumlah masing-masing paket 20 orang;
 - f. Memfasilitasi kegiatan pelatihan mulai dari awal sampai akhir kegiatan;
 - g. Membuat laporan kegiatan pelatihan secara tertulis yang disampaikan ke dinas (Bidang Pelatihan);
 - h. Melakukan pendampingan bagi calon wira usaha baru untuk memperoleh bantuan pinjaman modal usaha;
 - i. Memfasilitasi pemasaran produk wira usaha baru yang telah terbentuk di wilayahnya masing-masing.
3. Persyaratan untuk mendapatkan program sepuluh ribu wirausaha baru di kabupaten pamekasan sebagai berikut:
- a. Berdomisili atau mempunyai KTP Pamekasan.
 - b. Memiliki ijazah minimal Sekolah Derajat (SD) atau sederajat.

- c. Umur minimal 17 tahun dan maksimal 45 tahun.
- d. Tidak pernah mengikuti pelatihan wirausaha baru sebelumnya.¹³³

b. Pelatihan

Setelah melakukan sosialisasi program, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah proses pelatihan. Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan:

“Jadi yang menangani kegiatan penumbuhan wirausaha baru ini bidang pelatihan dan hubungan industrial, kan ada 4 bidang disini, bidang penanaman modal, kemudian bidang perizinan, bidang pelatihan dan hubungan industrial, kemudian bidang penempatan kerja. Khusus yang menangani ini adalah bidang pelatihan dan hubungan industrial memang sesuai dengan tupoksinya disitu, untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan”.¹³⁴

Pelatihan tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dalam memberikan pelatihan keterampilan bagi calon wira usaha baru dengan sasaran kegiatan masyarakat umum baik bersifat pribadi, kelompok usaha, santri ataupun organisasi kemasyarakatan. Bentuk pelatihan tersebut bisa berupa Menjahit, Membuat Sepatu, Membatik, Tataboga, Meubeller, Menjahit, Service Sepeda Motor, Pembuatan Speaker Aktif.

¹³³ Supriyanto (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan), *Wawancara*, di Kantor DPMPTSP dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan, 21 Juli 2022.

¹³⁴ Supriyanto (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan), *Wawancara*, di Kantor DPMPTSP dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan, 21 Juli 2022.

Berikut dokumentasi sebagian pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam menumbuhkan sepuluh ribu wirausaha baru:

Gambar 3.3 Pelatihan Menjahit



Gambar 3.4 Pelatihan Las Listrik



Gambar 3.5 Pelatihan Service Sepeda Motor



Pada tahun 2020 sampai 2021 sudah 3.157 penerima manfaat yang telah menerima pelatihan. Berikut rincian pelaksanaan pelatihan program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020:

Tabel 3.4 Rincian Penerima Manfaat Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru Tahun 2020.

NO	KECAMATAN	GRADE				TOTAL PESERT A
		A	B	C	D	
1.	PAMEKASAN	6	85	106	38	235
2.	TLANAKAN	1	8	117	22	148
3.	PROPO	2	41	36	22	101
4.	PADEMAWU	8	16	89	39	152
5.	GALIS	2	17	70	5	94
6.	LARANGAN	7	33	78	15	133
7.	KADUR	2	15	35	29	81
8.	PALENGAAN	45	86	22	14	167
9.	PEGANTENAN	11	23	54	1	89
10.	PAKONG	14	30	31	13	88
11.	WARU	9	24	26	16	75
12.	BATUMARMAR	1	38	27	5	71
13.	PASEAN	5	38	30	25	98
TOTAL SE KABUPATEN		113	454	721	244	1532
JUMLAH PRESENTASE		7%	30%	47%	16%	100%

Sumber: Dinas DPMPTSP dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan

Pada tahun 2022 Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan akan melatih 3000 wirausaha baru:

“Kurang lebih 2 tahun sudah berjalan 2020-2021 sekitar 3100 kemudian tahun 2022 kita tahun ini sudah mengadakan sampai bulan juli sudah mengadakan kegiatan pelatihan 62 paket (62 paket x 20 ya) insyallah

nanti di ahir bulan November target 3000 ini bisa terpenuhi”¹³⁵.

Sebagai bahan evaluasi program wirausaha baru, Dinas DPMPTSP dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan mengkategorikan penerima manfaat menjadi 4 bagian. Berikut kategori penerima manfaat program wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan:

1. Kategori A adalah wirausaha yang mengikuti pelatihan, mempunyai izin usaha, mempunyai sertifikat, usaha berjalan, alat cukup, mempunyai modal, menyerap tenaga kerja.
2. Kategori B adalah wirausaha yang mengikuti pelatihan, mempunyai izin usaha, mempunyai sertifikat, usaha berjalan, alat cukup, mempunyai modal, belum menyerap tenaga kerja.
3. Kategori C adalah wirausaha yang mengikuti pelatihan, mempunyai izin usaha, mempunyai sertifikat, usaha mulai berjalan, alat terbatas, tidak mempunyai modal, belum menyerap tenaga kerja.
4. Kategori D adalah wirausaha yang mengikuti pelatihan, mempunyai izin usaha, mempunyai sertifikat, usaha tidak

¹³⁵ Supriyanto (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan), *Wawancara*, di Kantor DPMPTSP dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan, 21 Juli 2022.

berjalan, tidak mempunyai alat, tidak mempunyai modal, belum menyerap tenaga kerja.¹³⁶

Pengkategorian ini juga untuk memudahkan serta mendorong penerima manfaat wirausaha baru untuk menjadi pengusaha dan menjalankan usahanya. Menurut suprianto:

“Untuk mengecek itu kita perintahkan fasilitator yang sudah kita bentuk itu untuk terus memantau mereka memonitor perkembangan dari yang sudah kita latih dan kita kategorikan menjadi 4 kategori A B C D”.¹³⁷

Selain kategori di atas, untuk menghindari duplikasi keikutsertaan peserta pelatihan, maka dalam melakukan input data menggunakan *basic* data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sedangkan pelaksanaan kegiatan pelatihan wirausaha baru dilakukan dengan metode pelatihan langsung dengan tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan dan dilaksanakan di beberapa tempat, yaitu di kantor DPMPTSP dan Naker, balai desa, pondok pesantren ataupun rumah-rumah penduduk. Hal ini disesuaikan dengan keterjangkauan peserta pelatihan sehingga diharapkan kegiatan pelatihan bisa mendekatkan diri kepada masyarakat. Materi pelatihan berupa teori dan praktek sesuai dengan jenis pelatihan. Adapun lama masing-masing kegiatan pelatihan disesuaikan dengan tingkat kesulitan dari materi pelatihan. Setiap

¹³⁶ Supriyanto (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan), *Wawancara*, di Kantor DPMPTSP dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan, 21 Juli 2022.

¹³⁷ Supriyanto (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan), *Wawancara*, di Kantor DPMPTSP dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan, 21 Juli 2022.

pelatihan semua peserta mendapatkan sertifikat dan Surat Ijin Usaha sesuai dengan bidangnya masing-masing.

c. Pasca Pelatihan

Setelah semua peserta mengikuti kegiatan pelatihan sesuai dengan peminatannya masing-masing selanjutnya dilakukan pendampingan yang berkelanjutan untuk membimbing agar mereka benar-benar dapat menjadi wirausaha baru. Pada kegiatan pendampingan ini dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendampingan untuk memperoleh alat dari bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Himbara ataupun pihak ketiga lainnya;

a. Jumlah Penerima Alat dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) Tahun 2020 Sebanyak 71 kelompok usaha setiap kelompok usaha terdiri dari 4 orang.

b. Jumlah Penerima Alat dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) Tahun 2021 Sebanyak 234 orang.¹³⁸

2. Pendampingan untuk memperoleh bantuan pinjaman modal usaha melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan.

Jumlah Penerima Manfaat Pinjaman Modal Usaha 2020 -2022

¹³⁸ Supriyanto (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan), *Wawancara*, di Kantor DPMPTSP dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan, 21 Juli 2022.

sebanyak 77 Wirausaha Baru dengan Jumlah Anggaran Rp. 1.734.000.000.¹³⁹

3. Pendampingan untuk memperoleh ijin PIRT dan sertifikasi halal melalui instansi terkait;
4. Pendampingan untuk memperoleh pemasaran baik secara online maupun secara offline. Pemasaran secara offline dilakukan bekerja sama dengan toko-toko yang ada di Pamekasan serta melalui program Warung Milik Rakyat (WAMIRA) yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan;¹⁴⁰
5. Untuk menjaga iklim berwirausaha bagi peserta wirausaha baru, dilakukan kegiatan Millenial Talent Hub (MTH) dengan mempertemukan antar peserta wirausaha baru disertai dengan memberikan motivasi oleh motivator yang kita hadirkan baik lokal maupun dari luar Pamekasan. Motivator ini adalah orang-orang sukses di bidangnya untuk berbagi cerita tentang kiat sukses yang mereka alami.

Dalam menjalankan usahanya sebagai wirausaha baru, peserta pelatihan boleh menjalankan usaha secara mandiri atau membentuk kelompok usaha sesuai bidangnya. Program

¹³⁹ Supriyanto (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan), *Wawancara*, di Kantor DPMPTSP dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan, 21 Juli 2022.

¹⁴⁰ Supriyanto (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan), *Wawancara*, di Kantor DPMPTSP dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan, 21 Juli 2022.

penumbuhan wira usaha baru ini juga dapat dilakukan dengan membentuk desa tematik dimana setiap desa mempunyai ciri khas dalam pemberdayaan masyarakat desanya. Dengan tiga tahapan di atas mulai dari pra pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan pasca pelatihan dapat berjalan dengan baik sehingga program penumbuhan wira usaha baru dapat berjalan sesuai target yang telah ditentukan.

Untuk melakukan monitoring fasilitator sering melakukan pertemuan, menurut Rahmad Wakil Fasilitator Kabupaten Pamekasan:

“Kita setiap bulan ada pertemuan Kordinator Kecamatan (Korcam) dan di setiap kecamatan itu pasti ada 1 Kordinator Kecamatan. Kita berkumpul tiap bulan biasanya pindah-pindah, semisal pindah Kecamatan Waru pindah Kecamatan Pasean atau pindah ke kota. Biasanya kordinasinya disitu, rapatnya tiap bulan pasti semua fasilitator di kabupaten, meskipun fasilitator sebagian yang kurang mumpuni ya pasti ada, karena di antara 42 orang ini tidak semuanya mampu disitu. Memang ada kekurangannya, tapi karena mereka sudah berpengalaman satu dua tahun ini mereka sudah mengerti tugas mereka”.¹⁴¹

Keberhasilan program sepuluh ribu wirausaha baru ditentukan oleh komunikasi antar pelaksana program seperti dinas, fasilitator, dan tokoh masyarakat.

2. Kebijakan Penunjang

Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Pamekasan guna mendukung penumbuhan wirausaha baru adalah:

¹⁴¹ Rahmad (Wakil Fasilitator Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru Kabupaten Pamekasan), wawancara, di Desa Palengan Laok, 27 Juli 2022.

- a. Menggunakan makanan dan minuman produk UMKM lokal Kabupaten Pamekasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pamekasan, termasuk hasil produksi wirausaha baru.¹⁴²
- b. Penyediaan modal dengan bunga 0% bagi penerima manfaat yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan.

Menurut kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan:

“Dinas koprasi ini memberikan dukungan bagi pelaksanaan wirausaha baru terutama tindak lanjut setelah pasca pelatihan tersebut. Dukungan yang diberikan pertama adalah permodalan. Kita siapkan anggaran sekitar 5 M untuk wirausaha baru yang sudah punya usaha, membangun usahanya resmi dengan dengan pinjaman bunganya 0%, 0% itu ya tapi karena ini pinjaman melalui bank ya tetap ada biaya adsmministrasi dan asuransi dsb tapi kalau bungannya sendiri 0%, walaupun ada yang bilang 1%, 1% itu adsmnistrasi dan asuransi, jadi kalau bunganya 0%”.¹⁴³

- c. Mengatur pengadaan seragam ASN untuk pakaian dan sepatu agar diatur merata ke semua pelaku usaha;
- d. Pengaturan perijinan toko modern agar menyediakan 25-30 % space yang menjual produk-produk lokal Pamekasan, khususnya produk-produk wirausaha baru;
- e. Menjadikan terminal kargo/barang yang selama ini tidak berfungsi menjadi rest area dengan menyediakan khusus produk-produk lokal Pamekasan dan mewajibkan bus wisata untuk masuk ke rest area tersebut;

¹⁴² Surat Edaran Bupati Pamekasan tentang Penggunaan Makanan dan Minuman Produk UMKM Kabupaten Pamekasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

¹⁴³ Muttaqin (Kepala Dinas Koperasi dan UKM), *Wawancara*, di Kantor Dinas Koperasi dan UKM, 04 Agustus 2022.

f. Selanjutnya untuk mendukung kegiatan penumbuhan wira usaha baru, bupati Pamekasan juga telah mengeluarkan kebijakan agar para ASN dapat menggunakan produk-produk wira usaha baru. Hal ini juga termasuk pada kegiatan rapat-rapat agar makanan dan minuman juga menggunakan UMKM lokal Pamekasan. Selain itu produk-produk wira usaha baru juga ditampilkan dalam pameran-pameran serta dijadikan souvenir bagi tamu-tamu dinas yang datang ke kabupaten Pamekasan.

3. Kendala Implementasi dan Realisasi Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru di Kabupaten Pamekasan

Dalam implementasi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan mengalami beberapa kendala seperti:

a. Pandemi Covid-19

Saat program sepuluh ribu wirausaha baru dijalankan pada tahun 2020 harus menghadapi pandemi covid-19. Pada tahun 2020 awalnya konsep pelatihan adalah 20 orang yang akhirnya diturunkan 16 orang pada tiap paket pelatihan, yakni peserta 16 orang dengan instruktur 1 orang dan fasilitator yang mendampingi 2 orang. Pada saat itu ketentuannya tidak boleh berkumpul lebih dari 20 orang selama pandemi covid-19. Pelaksanaan kegiatan pelatihan pada tahun 2020 menggunakan protokol kesehatan dengan ketat.

b. Keterbatasan Anggaran

Selain kendala pandemi kendala selanjutnya adalah peralatan, karena untuk bantuan alat tidak diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bantuan bersumber dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) perbankan, yakni forum *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang di pimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pamekasan. Sehingga alat menjadi kendala tersendiri bagi mereka yang sudah dilatih. Oleh karena itu optimalisasinya dengan membentuk kelompok usaha sehingga bisa dipakai bersama-sama.

c. Faktor Sumber Daya Manusia

Salah satu kendala realisasi program adalah tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Pamekasan yang masih rendah. Menurut Wakil Fasilitator Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru Kabupaten Pamekasan:

“Pertama kita perlu mengubah mindsetnya. Mereka harus diubah dulu biasanya males hanya tidur pagi, kita akan melatih menjadi calon-calon pengusaha, yang insyaallah 3 sampai 4 tahun kedepan bisa dirasakan. Kendala di setiap kecamatan memiliki kendala yang berbeda-beda, karena faktor pendidikan, karena terkadang meskipun diajak ga mau, jadi faktor pendidikan menentukan mau ikut program atau tidak. Kedua adalah semangat dari mereka. mereka yang harus diuji semangatnya. Selain itu ditanya ijazah dan banyak yang tidak punya ijazah”.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Rahmad (Wakil Fasilitator Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru Kabupaten Pamekasan), wawancara, di Desa Palengan Laok, 27 Juli 2022.

D. Implikasi Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru Bagi Penerima Manfaat di Kabupaten Pamekasan

Implikasi setelah mendapat program sepuluh ribu wirausaha baru bagi penerima manfaat di Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

1. Ilmu dan Keterampilan

Implikasi yang didapatkan dari program sepuluh ribu wirausaha baru adalah ilmu dan keterampilan usaha sesuai dengan potensi daerah dan keinginan penerima manfaat. Menurut hasil wawancara dari penerima manfaat desa Jalmak Kecamatan Pamekasan dengan pelatihan membuat:

“Tanggapan saya sebagai peserta membuat sangat bagus sekali, dengan adanya pelatihan ini kami bisa melakukan membuat dengan baik yang dari semula memang tidak tau apa-apa soal batik. Kami kedepannya ingin rasanya mengembangkan tidak hanya berhenti di pelatihan”.¹⁴⁵

Senada dengan apa yang dikatakan oleh Syafiudin peserta pelatihan wirausaha baru kabupaten pamekasan:

“Saya mau mengikuti pelatihan karena pemerintah di Kabupaten Pamekasan memiliki program yang sangat prioritas yaitu yang namanya WUB (wirausaha baru) yang menjadi program utama dari bapak Bupati H. Baddrut Tamam. Saya ikut pada tahun 2021. Saya ikut pelatihan songkok yang mana pada belum punya usaha songkok. Nah pada tahun 2021 saya ikut pelatihan yang namanya pelatihan pembuatan songkok nasional dan saya tidak sia-siakan waktu selama 15 hari. Saya dilatih untuk membuat songkok dan mendapatkan ilmu membuat songkok”.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Sumiati (Penerima manfaat), *wawancara*, di Balai Desa Jalmak, 05 Agustus 2022.

¹⁴⁶ Syafiudin (Penerima manfaat), *wawancara*, di rumahnya Desa Panempan, 03 Agustus 2022.

2. Keinginan Berwirausaha

Selain ilmu dan keterampilan, implikasi dari program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan adalah mental wirausaha. Menurut syafiudin penerima manfaat:

“Karena pelatihan saya memiliki keinginan kuat untuk berwirausaha. Memang ada sih dari teman-teman yang hanya ikut kadang-kadang karena ada transportnya karena keinginan yang lain karena ingin alat dsb jadi saya sangat berterimakasih karena dapat bantuan modal”.¹⁴⁷

Menurut sumiati

“Dengan adanya pelatihan membatik harapan kami di desa jalmak bisa mengembangkan atau bisa melanjutkan membatik sehingga bisa membawa desa jalmak ini lebih maju dan tingkat perekonomian di Desa Jalmak”.¹⁴⁸

Bagi penerima manfaat, pelatihan bisa mendorong untuk keinginan berwirausaha. Walau pun ada juga yang belum punya mental berwirausaha.

3. Fasilitas

Implikasi dari program sepuluh ribu wirausaha baru yang dirasakan oleh penerima manfaat antara lain sebagai berikut:

- a. Modal dengan bunga 0% dengan catatan peminjam harus alumni pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat wirausaha baru.
- b. Pemasaran di warung milik rakyat yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM bagi usaha yang telah berjalan dan

¹⁴⁷ Syafiudin (Penerima manfaat), wawancara, di rumahnya Desa Panempan, 03 Agustus 2022.

¹⁴⁸ Sumiati (Penerima manfaat), wawancara, di Balai Desa Jalmak, 05 Agustus 2022.

menghasilkan produk. Produk tersebut bisa seperti songkok, sepatu, tas, makanan, dan batik.

- c. Mendapatkan makan selama pelatihan dan uang transportasi.
- d. Sertifikat pelatihan program wirausaha baru Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang dikeluarkan oleh Dinas DPMPSTP dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan.

4. Pendapatan Penerima Manfaat

Bagi penerima manfaat program dan usahanya sudah berjalan tentu memberikan tambahan bagi pendapatannya. Menurut Syafiudin salah satu penerima manfaat yang menjalankan produksi usaha songkok:

“Karena usaha songkok saya ada tambahan pendapatan. sangat ada penambahan mangkanya saya sangat berterima kasih sekali lagi saya berterimakasih kepada bapak Bupati Pamekasan ada program yang namanya wirausaha baru”.¹⁴⁹

Selain ada tambahan pendapatan, bagi penerima manfaat yang sudah tergolong grade A telah bisa menyerap tenaga kerja.

Selain itu menurut Abd. Muin peserta wirausaha baru jenis pelatihan service AC:

“Alhamdulillah setelah mengikuti pelatihan *service AC* saya bisa memiliki tambahan pendapatan. Jadi saya sering melakukan *service* di kantor pemerintahan. Dari itu saya bisa memiliki tambahan”.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Syafiudin (Penerima Manfaat), wawancara, di rumahnya Desa Panempan, 03 Agustus 2022.

¹⁵⁰ Abd. Muin (Penerima Manfaat), wawancara, di rumahnya Desa Proppo 01 Agustus 2022

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Kebijakan Sepuluh Ribu Wirausaha Baru di Kabupaten Pamekasan

Program sepuluh ribu wirausaha baru atau yang dikenal dengan saputangan biru merupakan salah satu kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Latar belakang program sepuluh ribu wirausaha baru tersebut merupakan janji politik Bupati Pamekasan H. Baddrut Tamam tahun periode 2018-2023. Program tersebut merupakan program prioritas dalam bidang ekonomi. Gagasan sepuluh ribu wirausaha baru adalah hasil pembacaan sosial budaya serta kondisi perekonomian masyarakat Madura.

Masyarakat Madura dikenal dan memiliki etos kerja yang bagus. Etos kerja yang dimiliki masyarakat Madura yakni pekerja keras, ulet, dan tidak pilih-pilih pekerjaan. Oleh karena itu program sepuluh ribu wirausaha baru sebagai wadah untuk menggali potensi dan memaksimalkan etos kerja yang dimiliki oleh masyarakat Madura khususnya masyarakat Pamekasan. Selain etos kerja yang bagus, program tersebut sebagai jembatan bagi masyarakat Pamekasan yang memiliki keinginan kuat untuk sejahtera. Etos kerja dan keinginan sejahtera bagi masyarakat Madura merupakan bagian ibadah. Dengan alasan tersebut gagasan sepuluh ribu wirausaha baru dibuat agar bisa mendorong sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik.

Faktor kemiskinan merupakan faktor terpenting hadirnya program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan Pusat Badan Statistik (BPS) Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pamekasan pada Maret 2020 sebesar 14,60 %, hal ini sebanyak 14,95% penduduk Kabupaten Pamekasan berada di bawah garis kemiskinan.¹⁵¹ Program sepuluh ribu wirausaha baru merupakan gerakan ekonomi yang berpihak serta berbasis masyarakat dan menjadikan sumber daya manusia (SDM) sebagai instrumen kunci dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Pamekasan untuk pengentasan kemiskinan. Program sepuluh ribu wirausaha baru diharapkan menjadi stimulus dan mendorong inovasi serta pertumbuhan ekonomi masyarakat Pamekasan. Oleh karena itu program sepuluh ribu wirausaha dijadikan pondasi dalam pembangunan sektor ekonomi dengan harapan akan membangun kemandirian masyarakat. Program sepuluh ribu wirausaha baru sebagai bentuk kehadiran Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam menyediakan sarana dan prasarana ekonomi. Dengan program tersebut diharapkan bisa memberikan peluang dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi masyarakat Pamekasan. Program sepuluh ribu wirausaha baru bagian dari visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan konsep menyejahterakan masyarakat dari bawah, merata, dan berkelanjutan.

Program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan sebagai kebijakan publik tentu perlu dianalisis dengan teori kebijakan

¹⁵¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pamekasan*, 2021, 63.

publik. Jones (1976) berpendapat dalam perspektif konseptual variabel penting dalam pembuatan kebijakan publik tersebut sebagai berikut.¹⁵²

1. Definisi program sepuluh ribu wirausaha baru

Program sepuluh ribu merupakan program untuk menumbuhkan wirausaha baru bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan kebijakan tersebut diambil dengan latar belakang yang telah dibahas diatas, yakni kemiskinan, pengangguran, serta etos kerja masyarakat Madura. Program sepuluh ribu wirausaha baru diperuntukan bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk berwirausaha. Sosialisasi program wirausaha baru dilakukan oleh fasilitator kepada masyarakat Kabupaten Pamekasan. Definisi dan sosialisasi program penting dilakukan agar tidak timbul multipersepsi atas substansi kebijakan yang dibuat. Sehingga program sepuluh ribu wirausaha bisa dijalankan dalam baik. Pada awal perjalanan program, definisi wirausaha baru masih kelihatan multipersepsi terutama calon penerima program dan fasilitator sendiri.

2. Agenda *setting*

Program sepuluh ribu wirausaha baru merupakan janji politik Bupati Pamekasan H. Baddrut Tamam periode 2018-2023. Setelah mendapatkan persetujuan dari semua unsur politik di Kabupaten Pamekasan. Program sepuluh ribu wirausaha baru kemudian menjadi program prioritas Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Program

¹⁵² Sahya Anggara. *Pengantar Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 50.

tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023. Setelah tertuang dalam RPJMD program sepuluh ribu wirasuaaha baru kemudian disusun menjadi program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan pelatihan dan pendampingan penanggung jawab pelatihan, sedangkan dinas Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan yang memberikan akses dalam permodalan.

3. Organisasi atau Lembaga

Program sepuluh ribu wirausha baru dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Pamekasan untuk proses pelatihan dan pendampingan, Badan Perencanaan Daerah Pamekasan sebagai lembaga penyalur *corporate social responsibility* (CSR) dari pihak ketiga kepada penerima program sepuluh ribu wirausaha baru, sedangkan Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan sebagai Lembaga yang memberikan dan pendampingan dalam permodalan. Secara umum Lembaga yang menjalan dan terlibat dalam program sepuluh ribu wirausaha baru sudah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

4. Agregasi

Program sepuluh ribu wirausaha baru memiliki ruang lingkup di Kabupaten Pamekasan dengan kuantitas target yakni sepuluh ribu wirausaha baru. Sehingga diharapkan ada sepuluh ribu penerima manfaat dari program tersebut. Program ini tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

Program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan dalam perspektif jenis kebijakan publik dalam pandangan James E. Anderson termasuk jenis kebijakan *Substantive and Procedural Policies*.¹⁵³ Program sepuluh ribu wirausaha baru dimaksudkan dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Dilihat dari *Procedural policy* atau kebijakan prosedural program sepuluh ribu wirausaha baru memiliki standart dan prosedur (*standart operating procedure*) dalam kriteria penerima manfaat atau instansi-instansi yang terlibat dalam menjalankan program tersebut. Dilihat dari tingkatannya, program sepuluh ribu wirausaha baru merupakan kebijakan publik lingkup daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan rumah tangga daerah. Program sepuluh ribu wirausaha baru merupakan kebijakan umum di tingkat daerah yang berbentuk Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan.

¹⁵³ Sahya Anggara. *Pengantar Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 55.

Jika dilihat dalam perspektif Islam program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan dengan latar belakang masyarakat Madura khususnya Pamekasan yang memiliki spritualitas yang bagus dan dengan mayoritas beragama Islam. Maka kebijakan atau program tersebut merupakan alat yang bisa mendukung untuk mencapai tujuan Syariah. Secara teknis, dalam Islam pemerintah dianjurkan memiliki tanggung jawab untuk menjaga hukum, ketertiban, dan menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam Islam, negara harus memiliki peran dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan serta mendorong tatanan ekonomi yang berkeadilan.¹⁵⁴

Hakikat politik ekonomi Islam adalah kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintahan dalam pembangunan ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.¹⁵⁵ Dengan demikian program sepuluh ribu wirausaha baru dilain sisi juga bisa sebagai instrument dalam upaya kesejateraan umat Islam yang berada di Kabupaten Pamekasan. Harapan akhirnya, jika masyarakat sejahtera maka bisa menjaga serta mendakwahkan agama Islam secara umum.

¹⁵⁴ Any Setianingrum. "Desentralisasi Fiskal Kontemporer dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam". *Ekonomika-Bisnis*, Vol. 4 No.1, (Januari, 2013), 07.

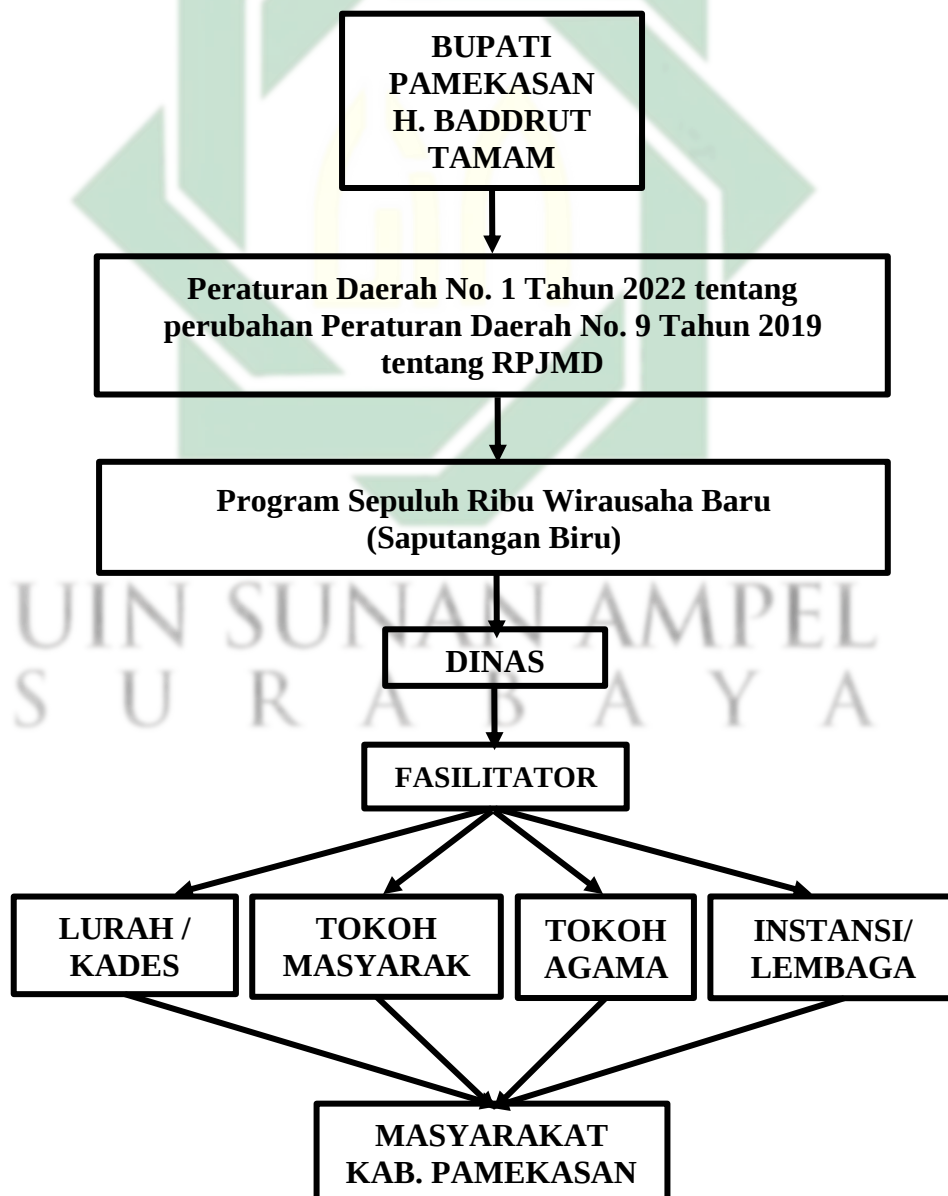
¹⁵⁵ Aisya Farina. "Refleksi Sejarah Perkembangan Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Islam Pada Masa Khulafa' al-Rasyidin. *Iltizamat*, Vol 2, No 1, (Juni, 2022), 91.

B. Implementasi Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru di Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan pengamatan peneliti skema implementasi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan bisa dilihat dari gambar berikut:

Gambar 4.1

Alur Implementasi Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru Sampai pada Masyarakat.



Dari gambar di atas maka analisis ini hanya fokus pada model implementasi kebijakan publik yang bersifat *top-down*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan akan dijelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi Implementasi Program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu implementasi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan dianalisis melalui model implementasi yang dikembangkan oleh George Charles Edwards III, Marille S. Grindle, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, Donald Van Meter dan Carl Van Horn, dan Eugene Bardach. Analisis tersebut dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Model administratif dan politik

Berdasarkan definisi *implementation* dari Grindle bahwa implementasi sebagai proses politik dan proses administrasi.¹⁵⁶ Program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan secara *Content* (isi) program dan mengenai *Context* (kondisi lingkungan) yang memiliki kaitan pengaruh atau hubungan terhadap implementasi sudah berjalan dengan baik. Secara gagasan dan konsep program sepuluh ribu wirausaha baru yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023 sudah bisa dijadikan pedoman dalam proses implementasi program sepuluh ribu wirausaha baru. Walau pun perlu ada penjelasan yang lebih detail soal program tersebut kepada

¹⁵⁶ Agus Subianto. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi*. (Surabaya: Brilliant, 2020), 46.

masyarakat. Dukungan masyarakat terhadap program tersebut juga tergolong sudah berjalan dengan baik.

2. Sumber Daya

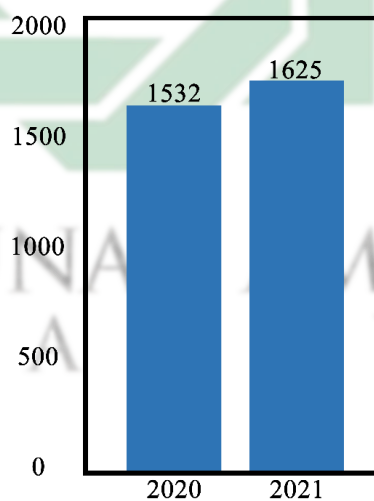
Program sepuluh ribu wirausaha baru memiliki dua sumber daya, yakni sumber daya manusia atau implementator Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru di Kabupaten Pamekasan dan pembiayaan program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan. Sumber daya manusia atau implementator program sepuluh ribu wirausaha baru khususnya fasilitator yang menjadi ujung tombak dan paling terdekat dengan penerima manfaat program hanya berjumlah 42 fasilitator. Jumlah ini sangat terbatas jika dibandingkan dengan target yang telah ditentukan atau jika harus melakukan pendampingan dengan 3000 penerima manfaat yang telah dilakukan selama tahun 2020-2021. Selain itu, keterbatasan alat sebagai salah satu bagian terpenting dalam produksi menjadi catatan dalam suksesnya program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan. Selama realisasi program Pemerintah Kabupaten Pamekasan hanya mengandalkan *corporate social responsibility* (CSR) untuk membantu alat produksi bagi calon wirausaha baru. Hal ini tentu akan berdampak pada terciptanya sepuluh ribu wirasuaha baru di Kabupaten Pamekasan. Sedangkan implementasi berdasarkan Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn:

Implementasi yang Sempurna (1978) adalah memiliki sumber daya serta waktu yang cukup dalam melaksanakan sebuah program.¹⁵⁷

3. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan memiliki tujuan agar menumbuhkan wirausaha baru untuk mengentaskan kemiskinan serta mengurangi pengangguran di Kabupaten Pamekasan dan target *group* program wirausaha baru adalah masyarakat Kabupaten Pamekasan. Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn Van Meter dan Van Horn, indikator-indikator kinerja merupakan tahapan krusial dalam analisis implementasi kebijakan serta menilai realisasi sebuah program.¹⁵⁸

Gambar 4.2 Peningkatan Peserta Manfaat



Sumber: Peneliti

¹⁵⁷ Sahya Anggara. *Pengantar Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 246.

¹⁵⁸ Mahendra Purnama Yahya, Bambang Santoso dan Alfi Haris Wanto. "Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula di Kementerian Koperasi Dan UKM (Studi Pada Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Profit*, Vol. 12, No. 02, (2018), 34.

Program sepuluh ribu wirausaha baru sudah dirasakan manfaatnya oleh para penerima manfaat sebanyak 3.157 selama tahun 2020-2021. Berdasarkan data dari Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 peserta pelatihan atau penerima manfaat program sepuluh ribu wirausaha baru mencapai 84% yang sudah memulai usaha sedangkan 16% tidak menjalankan usaha. Sedangkan peserta pelatihan yang sudah bisa berwirausaha dan menyerap tenaga kerja masih 7%. Selain itu juga berdasarkan hasil wawancara dengan fasilitator kualitas program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan semakin baik pada tahun 2021. Penerima bantuan 2017 dapat diketahui bahwa bantuan yang diberikan bermanfaat untuk dipergunakan membeli kebutuhan usaha seperti bahan baku dan peralatan sehingga output produksi menjadi meningkat. Sementara itu, dari segi pemasaran didampingi oleh dinas terkait telah mampu memasarkan produknya keluar kota bahkan hingga mancanegara.

Program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan, jika dikaitkan dengan pandangan Grindle bahwa tipe manfaat kebijakan yang memberikan manfaat secara kolektif akan lebih mudah untuk memperoleh dukungan dan tingkat kepatuhan yang tinggi dari masyarakat banyak.

4. Komunikasi Aktivitas Pelaksana Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru di Kabupaten Pamekasan

Komunikasi dalam menjalankan program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan sangat penting. Menurut Edward III (1980) Komunikasi antara organisasi pelaksana, dalam implementasi kebijakan seperti kejelasan informasi (*Clarity*), konsistensi informasi (*Consistency*) dan transformasi (transmisi).¹⁵⁹ Perlu ada aktivitas komunikasi yang baik mengenai program sepuluh ribu wirausaha baru Di Kabupaten Pamekasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pamekasan, serta Dinas Koperasi dan UKM. Program tersebut hanya dapat diimplementasikan dengan baik, jika jelas bagi pelaksana terutama komunikasi antara dinas yang terlibat. Utamanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan dengan Fasilitator. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi (*clarity*) serta konsentrasi informasi yang disampaikan.

Komunikasi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan dalam upaya menumbuhkan sepuluh ribu wirausaha baru di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

¹⁵⁹ Agus Subianto. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi*. (Surabaya: Brilliant, 2020), 70.

Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi yang dilakukan secara langsung dilakukan melalui koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait. Sementara itu, komunikasi tidak langsung merupakan komunikasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai media sarana komunikasi seperti telepon, SMS, whatsapp, dan media sosial lainnya. Sebagian besar komunikasi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan dilakukan melalui komunikasi secara tidak langsung.

Komunikasi melalui proses transmisi terhadap para pelaksana kebijakan seperti sosialisasi dan koordinasi difasilitasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan. Komunikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan dengan pelaksana program di lapangan seperti fasilitator wirausaha baru di tingkat kecamatan sudah baik walau pun perlu dimaksimalkan lagi. Selain itu, harusnya komunikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan dengan tokoh masyarakat, lurah/kades, tokoh agama, dan instansi atau lembaga lain tidak hanya mengandalkan fasilitator, akan tetapi dinas tersebut juga terlibat komunikasi langsung terhadap kepala desa dan kecamatan di Kabupaten Pamekasan. sedangkan untuk komunikasi

antara organisasi perangkat daerah atau dinas di tingkat daerah ternyata juga belum maksimal, utamanya dengan dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pamekasan, dan Dinas Koperasi dan UKM.

Hal yang juga perlu diperhatikan adalah masyarakat Kabupaten Pamekasan secara luas yang memiliki keinginan untuk menjadi penerima manfaat atau menjadi wirausaha baru. Kurang maksimalnya media yang bisa digunakan sebagai sarana komunikasi program seperti Instagram dan *website* yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan masih sulit untuk diakses dan masih belum optimal dan konsisten dalam melakukan informasi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan. Seharusnya hal tersebut bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi yang efektif agar menjangkau masyarakat lebih luas.

5. Karakteristik Agen Pelaksana

Implementasi program sepuluh ribu wirausaha di Kabupaten Pamekasan tidak lepas dari tiga aktor, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan, Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pamekasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan

sebagai *leading sector* implementasi dalam menumbuhkan sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan yang memberikan pelatihan dan pemdampingan. Dinas Koperasi dan UKM yang menyediakan modal serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pamekasan yang meberikan bantuan alat bagi penerima program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan dari forum *Corporate Social Responsibility* (CSR) Kabupaten Pamekasan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan memberikan peluang bagi kelompok masyarakat untuk bekerja sama dalam penumbuhan sepuluh ribu wirausaha baru. Hal ini dilakukan untuk bersama-sama dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

6. Sikap atau Disposisi Pelaksana Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru di Kabupaten Pamekasan

Menurut Edwarrrd III dalam kecenderungan disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.¹⁶⁰ Sikap atau disposisi bisa digambarkan dengan kecenderungan dan perilaku birokrasi dari bawahan terhadap atasan. Dalam implementasi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan bisa dilihat dari komitmen untuk menyelesaikan pekerjaannya meskipun target program harus menghadapi kendala.

¹⁶⁰ Sahya Anggara. *Pengantar Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 253.

Komitmen yang tinggi dari birokrasi atau dinas akan memberi dampak positif bagi implementasi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan. Walau pun beberapa dinas belum melaksanakan Surat Edaran Bupati Pamekasan dalam menggunakan makanan dan minuman produk UMKM lokal Kabupaten Pamekasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan pengamatan peneliti jika komitmen dan respon birokrasi pada program sepuluh ribu wirausaha baru tinggi, maka itu akan menambah omset usaha, serta keuntungan bersih bagi wirausaha baru yang telah diciptakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Selain itu juga bisa menjaga keberlanjutan usaha milik UMKM lokal dan wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan.

7. Lingkungan kebijakan

Lingkungan kebijakan di Kabupaten Pamekasan sudah baik untuk mendukung iklim kewirausahaan. Ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan dan program dalam membangun iklim berwirausaha bagi peserta wirausaha baru seperti dilakukannya kegiatan *Millennial Talent Hub* (MTH) dengan mempertemukan antar peserta wirausaha baru disertai dengan memberikan motivasi oleh motivator yang kita hadirkan baik lokal maupun dari luar Pamekasan. Pelaku usaha termasuk UMKM lokal Pamekasan dan peserta wirausaha baru mendapatkan pendampingan untuk memperoleh pemasaran. Pemasaran secara offline dilakukan bekerja sama dengan toko-toko

yang ada di Pamekasan serta melalui program Warung Milik Rakyat (WAMIRA) yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan. Selain itu Penyediaan modal dengan bunga 0% bagi peserta wirausaha baru yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan. Ditambah dengan Surat Edaran Bupati Pamekasan tentang Penggunaan Makanan dan Minuman Produk UMKM Kabupaten Pamekasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Hanya saja yang perlu ditekankan adalah konsistensi dan komitmen dari pelaksana serta penerima manfaat program wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan.

Untuk kegiatan pelatihan dalam program sepuluh ribu wirausaha baru masyarakat memberikan respon positif terhadap program tersebut. Masyarakat banyak yang ingin mengikuti pelatihan akan tetapi karena kegiatan pelatihan hanya terbatas pada 20 orang setiap paket kegiatan. Sementara itu dari sisi politik Pemerintah Kabupaten Pamekasan terbuka untuk menerima masukan dan pengajuan dari organisasi kemasyarakatan untuk mengadakan pelatihan dalam menumbuhkan wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan. Dengan adanya kolaborasi dari organisasi masyarakat diharapkan bisa mendorong realisasi program wirausaha baru sesuai dengan target. Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pamekasan berusaha untuk bersifat

netral dan mengakomodir tuntutan atau permintaan elit politik dengan syarat harus sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program.

C. Implikasi Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru Bagi Penerima Manfaat di Kabupaten Pamekasan

Dari hasil penelitian tersebut implikasi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan yang dirasakan oleh penerima manfaat dari program adalah merangsang mental kewirausahaan. Jika dianalisis dengan perspektif Geoffrey G. Meredith, bahwa wirausaha merupakan manusia yang memiliki keterampilan untuk melihat dan menilai kesempatan bisnis; mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk mencari keuntungan dari usaha tersebut agar mendapatkan kesuksesan.¹⁶¹ Dalam program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan penerima manfaat melalui fasilitator mendiskusikan terlebih dahulu potensi yang bisa dikembangkan di daerah masing-masing sehingga dalam proses pelatihan bisa menilai kesempatan bisnis yang bisa dijalankan.

Selain itu berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter (1934) menjelaskan kewirausahaan adalah menekankan pada penciptaan atau melakukan hal-hal baru, jika melakukan sesuatu yang sudah lama paling tidak dengan cara baru, baik dalam membuat produk baru, kualitas baru, cara produksi baru, sumber pasokan, pasar, dan

¹⁶¹ Yuyus Suryana & Kartib Bayu, *Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*, (Jakarta: Kencana, 2010), 12.

organisasi.¹⁶² Dengan program wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan para penerima manfaat telah menemukan pola-pola baru seperti sepatu baik dan songkok batik. Jika melihat produksi songkok dan sepatu tentu sudah lama dilakukan, akan tetapi dengan kombinasi batik Pamekasan menjadi sebuah produk yang baru. Dari berbagai pandangan soal kewirausahaan dan pendapat bisa diambil sebuah benang merah bahwa kewirausahaan merupakan keterampilan dan kemampuan serta kemauan seseorang dalam mengambil resiko dengan membuat sesuatu yang baru dengan kreativitas dan inovasi serta memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mendapatkan keuntungan. Program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan secara umum telah mendorong mental kewirausahaan masyarakat Kabupaten Pamekasan utamanya penerima manfaat program tersebut.

Selain membentuk mental kewirausahaan, penerima manfaat program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan, bagi yang telah berhasil menjalankan usaha telah merasakan pedapatan atas usahanya. Dengan program sepuluh ribu wirausaha baru para penerima manfaat bisa mengembangkan usahanya dengan fasilitas yang disediakan dari program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan. Fasilitas seperti modal dan program Warung Milik Rakyat (WAMIRA) yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM.

¹⁶² Rusdiana. *Kewirausahaan Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 47.

Melalui program sepuluh ribu wirausaha baru, jika dilihat dalam perspektif Zimmerer dan Scarborough, berdasarkan profil wirausaha berdasarkan kegiatan usahanya maka dapat dilihat beberapa jenis usahanya adalah *Part time entrepreneur*, yakni wirausaha yang menjalankan usahanya sebagian waktu saja dalam mencari peluang usaha yang ada.¹⁶³ Selain itu adalah *Copreneurs*, yaitu usaha yang dijalankan oleh dua orang wirausaha dalam menjalankan usaha bersama-sama. Ini selaras dengan dorongan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam program sepuluh ribu wirausaha baru bagi yang belum mungkin sendiri, agar untuk membentuk kelompok. Sehingga kelompok tersebut dibantu alat dalam produksi usaha dari forum *corporate social responsibility* CSR yang diampu oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan.

Wirausaha baru yang terbentuk oleh program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan jika diklasifikasikan berdasarkan motivasi, dapat dikategorikan wirausaha Induksi, yakni wirausaha yang didorong untuk mengambil suatu kegiatan kewirausahaan melalui pemanfaatan program sepuluh ribu wirausaha baru yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Di Kabupaten Pamekasan memang tidak semuanya peserta pelatihan dan penerima manfaat program sepuluh ribu wirausaha baru berhasil menjalankan usaha dan menjadi wirausaha atau pengusaha baru.

¹⁶³ Edy Dwi Kuniati. *Kewirausahaan industri* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 143.

Oleh karena implementasi program sepuluh ribu wirausaha baru perlu terus dievaluasi dengan intens. Walaupun secara umum setiap penerima telah mendapatkan fasilitas dari pemerintah, akan tetapi tujuan utama program sepuluh ribu wirausaha baru adalah menciptakan wirausaha baru, sehingga pendampingan, optimalisasi, dan evaluasi program perlu dilakukan secara terus menerus sehingga tujuan program bisa tercapai dengan baik.

Kewirausahaan dalam pandangan Islam merupakan pengelolaan suatu usaha yang diniatkan sebagai ibadah dengan tujuan mencapai kemaslahatan hidup. Artinya pada setiap tahapan dalam usaha bersandar pada esensi spiritualitas Islam. Peran spiritualitas Islam dengan dasar keimanan kepada Allah SWT akan membentuk sikap yang orientasinya sebagai bentuk ibadah. Melalui paradigma tauhid maka diharapkan terwujudnya hubungan yang harmoni di antara dunia dan akhirat dalam konteks kewirausahaan.¹⁶⁴ Spiritualitas Islam yang dimiliki setiap manusia dapat dikembangkan agar lebih bermanfaat dan berdaya guna sebagai motivasi hingga tindakan dalam pencapaian tujuan kehidupan di dunia. Ini selaras dengan latar belakang lahirnya program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan dengan melihat kondisi masyarakat Madura yang memiliki tingkat spritualitas yang baik.

Melalui anjuran agama Islam untuk melakukan wirausaha. Program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan merupakan

¹⁶⁴ Hanifiyah Yuliatul Hijriah. "Spiritualitas Islam dalam Kewirausahaan". *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 12, No. 1, (Mei, 2016), 192.

tergolong sebagai langkah untuk mendorong eksistensi seorang muslim dan akidah yang dibawahnya ditengah-tengah hegemoni masyarakat global, mengingat mayoritas masyarakat Pamekasan beragama Islam. Selain itu, semua perjuangan dakwah agama Islam tidak bisa begitu saja berjalan tanpa dukungan finansial yang kuat. Oleh karena itu, harapan munculnya *entrepreneur* muslim yang jujur dan Amanah, serta memiliki peran dalam dakwah agama Islam dari program wirausaha baru sangat penting. Mendorong lahirnya *entrepreneur* muslim modern dengan menggali segala potensi yang dimiliki.¹⁶⁵ Program sepuluh ribu wirausaha baru bisa dijadikan wahana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Hal yang paling penting, Islam mengajarkan penerapan prinsip-prinsip syariah di dalam entitas usaha. Pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syariat yakni aturan-aturan dalam al-Qur'an dan hadis. Syariat merupakan nilai utama yang menjadi pedoman bagi wirausaha dalam melaksanakan kegiatan bisnis baik langkah strategis ataupun taktis.¹⁶⁶

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁶⁵ Zahid Mubarak, Hendri Tanjung, dan Abbas Mansur Tamam. "Konsep Pendidikan Wirausaha dan Kemandirian bagi Anak Panti Asuhan". *Ta'dibuna*, Vol. 6, No. 1, (April, 2017), 104.

¹⁶⁶ Hanifiyah Yuliatul Hijriah. "Spiritualitas Islam dalam Kewirausahaan". *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 12, No. 1, (Mei, 2016), 195.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Sepuluh Ribu Wirausaha Baru di Kabupaten Pamekasan.

Program sepuluh ribu wirausaha baru adalah kebijakan publik di bidang ekonomi oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mengentaskan kemiskinan sudah tepat. Program sepuluh ribu wirausaha baru paling tidak sudah memiliki tiga dimensi yang saling berhubungan.

- a. Memiliki tujuan untuk mendorong ekonomi kerakyatan dari bawah sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan dampak pada pendapatan masyarakat. Tujuan akhirnya untuk menghadapi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan di Kabupaten Pamekasan.
- b. Tindakan yang dipilih sah secara hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2019 tertuang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.
- c. Hipotesis yang dipilih dengan melihat etos kerja masyarakat madura dan masih minimnya industrialiasi maka mendorong

pelaku UMKM dan menciptakan wirausaha baru adalah kebijakan yang tepat. Melalui terget sepuluh ribu paling tidak ini merupakan gambaran terget jelas Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagai motivasi dalam menjalan roda pemerintahan. Dengan melihat spritualitas masyarakat Pamekasan yang bagus, sehingga harapannya bisa mewadahi dan mendorong wirausaha dari kalangan muslim.

2. Implementasi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka implementasi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan merupakan kebijakan publik yang bersifat *top-down*. Jika dilihat dari implementasi program sepuluh ribu wirausaha baru pada tahun 2020 pemerintah telah mengklaim 84% wirausaha baru yang mulai menjalankan usaha, meski pun kerbertahanan atau sustainability juga perlu diperhatikan. Utamanya penerima manfaat yang dilatih pada tahun-tahun sebelumnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan sejauh pengamatan peneliti adalah komitmen birokrasi, komukasi para implementator baik antara dinas, fasilitator, perangkat desa, kecamatan perlu ditingkatkan kembali. Sumber daya manusia juga harus ditingkatkan serta penyedian anggaran yang cukup. Hal yang tidak boleh dilupakan juga karakter dan disposisi agen pelaksa sehingga

komitmen dalam mewujudkan sepuluh ribu wirausaha baru bisa terealisasi dengan baik.

3. Implikasi program sepuluh ribu wirausaha baru bagi penerima manfaat di Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan hasil analisis, implikasi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan yang dirasakan bagi penerima manfaat adalah mental kewirausahaan. Melalui program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan penerima manfaat mencari potensi yang bisa dikembangkan di daerah masing-masing sehingga dalam proses pelatihan bisa menilai kesempatan bisnis yang bisa dijalankan. Dengan program wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan para penerima manfaat telah menemukan pola-pola baru seperti sepatu batik dan songkok batik. Jika melihat produksi songkok dan sepatu tentu sudah lama dilakukan, akan tetapi dengan kombinasi batik Pamekasan menjadi sebuah produk yang baru. Selain membentuk mental kewirausahaan, penerima manfaat program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan bisa mengembangkan usahanya dan sebagian telah menggunakan fasilitas seperti modal dan pemasaran pada program Warung Milik Rakyat (WAMIRA) yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM.

Jika dikategorikan, berdasarkan pengamatan peneliti, hasil dari program sepuluh ribu wirausaha bagi penerima manfaat dengan jenis usaha adalah *Part time entrepreneur* dan *Copreneurs*, yaitu usaha yang

dijalankan oleh dua orang wirausaha dalam menjalankan usaha bersama-sama. Ini selaras dengan dorongan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam program sepuluh ribu wirausaha baru bagi yang belum memungkinkan sendiri, agar untuk membentuk kelompok. Sehingga kelompok tersebut dibantu alat produksi usaha dari *corporate social responsibility* (CSR). Rata-rata wirausaha baru yang terbentuk oleh program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan adalah wirausaha induksi, yakni wirausaha yang didorong untuk mengambil suatu kegiatan kewirausahaan melalui pemanfaatan program sepuluh ribu wirausaha baru oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

B. SARAN

1. Membangun dan menguatkan kemitraan dengan perusahaan besar, pesantren, universitas, serta lembaga lainnya untuk optimalisasi program sepuluh ribu wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan.
2. Penguatan dan konsolidasi mengenai komitmen implementator agar program sepuluh ribu wirausaha baru terwujud, baik itu dinas dan fasilitator.
3. Melakukan evaluasi dan monitoring secara lebih rutin terhadap penerima manfaat yang telah dilatih.
4. Membangun kerja sama dengan media untuk mempromosikan produk wirausaha baru.

5. Konsistensi dan komitmen terhadap kebijakan penunjang seperti melaksanakan surat edaran Bupati Pamekasan untuk bekerja sama dengan produk UMKM lokal Pamekasan guna menciptakan iklim kewirausahaan di Kabupaten Pamekasan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Ghafur dan Saifuddin Syuhri. "Entrepreneuership Perspektif Islam".
Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, Vol. 3, No.1,
(April, 2022), 74-84.
- Abdullah. Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Muamalah. Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- Afwan, Adasiha. "Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Tingkat Kewirausahaan di Indonesia (Studi pada Program Kredit Usaha Rakyat Periode Tahun 2008-2014", *Skripsi*, 2014.
- Agus Subianto. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant, 2020.
- Aisyah Farina. "Refleksi Sejarah Perkembangan Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Islam Pada Masa Khulafa' al-Rasyidin".
Iltizamat, Vol 2, No. 1, (Juni, 2022), 91-103.
- Alma. Buchari. *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Amien Wahyudi. "Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam".
Justitia Islamica, Vol. 10, No. 1, (Juni, 2013), 58-80.
- Anggara. Sahya. *Pengantar Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia. 2018.
- Anoraga. Pandji & H. Djoko Sudantoko. *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002.

Any Setianingrum. “Desentralisasi Fiskal Kontemporer dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam”. *Ekonomika-Bisnis*, Vol. 4 No.1, (Januari, 2013), 01-12.

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: Pustaka Setia. 2014.

Edy Dwi Kuniati. *Kewirausahaan industri*. Yogyakarta: Deepublish, Maret 2018.

Eko Handoyo. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, 2012.

Elfa Yuliana. “Kewirausahaan dalam Perspektif Islam”. *Ta’dib*, Vol. 15, No. 2, (Juli-Des, 2017), 29-44.

Fawahan. Lian dan Ita Marianingsih. “Membangun Branding Produk UMKM Melalui Media Sosial Tiktok.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 04, No. 02, (2022), 280-289.

Fidianing Sopah, Winda Kusumawati dan Calvin Edo Wahyudi. “Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo.” *Syntax Idea*, Vol. 02, No.0 6, (Juni, 2020), 26-40.

Fikri Maulana. “Pendidikan Kewirausahaan dalam Islam”. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 01, (2019), 30-44.

Handoyo. Eko. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya. 2012.

Hanifiyah Yuliatul Hijriah. “Spiritualitas Islam dalam Kewirausahaan”. *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 12, No. 1, (Mei, 2016), 187-208.

Imam, Mohammad, Sufiyanto, Shaleoddin. “Pembinaan Dan Pelatihan Dalam Pengembangan Wirausaha Program Kegiatan Wirausaha Muda Sumenep (WMS) Untuk Mengembangkan Kewirausahaan”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial*, Vol. 1 No. 2 Februari 2021.

Khairul Anwar. *Ekonomi-Politik*. Riau: Penerbit Alaf, 2011. 23

M. Zainal Anwar. “Formalisasi Syari’at Islam Di Indonesia: Pendekatan Pluralisme Politik Dalam Kebijakan Publik”. *Millah*, Vol. X, No 2, (Februari, 2011), 192-212.

Mahendra Purnama Yahya, Bambang Santoso dan Alfi Haris Wanto. “Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula di Kementerian Koperasi Dan UKM (Studi Pada Kabupaten Lombok Tengah).” *Jurnal Profit*, Vol. 12, No. 02, (2018), 31-38.

Mohammad Imam Sufiyanto dan Shalehoddin. “Pembinaan dan Pelatihan Dalam Pengembangan Wirausaha Program Kegiatan Wirausaha Muda Sumenep (WMS) Untuk Mengembangkan Kewirausahaan.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial*, Vol. 01, No. 02, (Februari, 2021), 83- 92.

Prasetyo, Bagas Nugroho. “Pemberdayaan Masyarakat Eks Lokalisasi Dolly Melalui Pengembangan Wirausaha oleh Pemerintah Kota Surabaya”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 5, No 2, Mei-Agustus 2017.

Prasetyo. Paiman Eko. “Peran Strategis Kewirausahaan Dalam Mendukung Kebijakan *Four Track Strategy* di Indonesia.” *Jurnal Optimum*, Vol. 10, No. 01, (Maret, 2020), 84-94.

Purnama, Mahendra Yahya, Bambang Santoso, Alfi Haris Wanto. “Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula di Kementerian Koperasi Dan UKM (Studi Pada Kabupaten Lombok Tengah)”, *Jurnal Profit*, Vol. 12 No.2 2018.

RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

Rusdiana. *Kewirausahaan Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia. 2018.

Sahroni, Susanto, Moh. Sutoro, Mukrodi, Muger Apriansyah. “Penumbuhan Wirausaha Baru Pada Majelis Da’wah Al’adni.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 01, No. 02, (Mei, 2020), 156-160.

Sahya anggara. *Pengantar Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Sopah. Fidianing, Winda Kusumawati dan Calvin Edo Wahyudi. “Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo.” *Syntax Idea*, Vol. 02, No.0 6, (Juni, 2020), 26-40.

Sufiyanto. Mohammad Imam dan Shalehoddin. “Pembinaan Dan Pelatihan Dalam Pengembangan Wirausaha Program Kegiatan Wirausaha

Muda Sumenep (WMS) Untuk Mengembangkan Kewirausahaan.”
Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial, Vol. 01, No. 02,
(Februari, 2021), 83- 92.

Sugiyono. *Metode penelitian kebijakan*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Suryana. Yuyus & Kartib Bayu. *Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*. Jakarta: Kencana. 2010.

W. zimmerer. Thomas dan Norman, Scarbrough. *Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Kecil*. Jakarta: Erlangga. 2005.

Wadhan. *Pengantar kewirausahaan*. Surabaya: Pena Salsabila, 2013.

Yahya. Mahendra Purnama, Bambang Santoso dan Alfi Haris Wanto.
“Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula di Kementerian Koperasi Dan UKM (Studi Pada Kabupaten Lombok Tengah).” *Jurnal Profit*, Vol. 12, No. 02, (2018), 31-38.

Yani Mulyaningsih Darwin. *Pengembangan ekosistem kewirausahaan UMKM di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

Zahid Mubarak, Hendri Tanjung, dan Abbas Mansur Tamam. “Konsep Pendidikan Wirausaha dan Kemandirian bagi Anak Panti Asuhan”.
Ta’dibuna, Vol. 6, No. 1, (April, 2017), 96-117.

<http://pamekasankab.go.id/berita/194/program-sepuluh-ribu-wirausaha-baru-saputangan-biru>

<http://pamekasankab.go.id/berita/194/program-sepuluh-ribu-wirausaha-baru-saputangan-biru>

<https://madura.tribunnews.com/2022/02/07/tahun-2022-pemkab-pamekasan-targetkan-melatih-3-ribu-orang-jadi-pengusaha-baru-ini-sasarannya>

<https://pip.kemenkeu.go.id/id/data-publikasi/berita-terbaru/123-pip-dukung-penguatan-kontribusi-umkm-terhadap-ekonomi>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A